HARIAN
GORONTALO POST
Pertama dan Terbesar di Gorontalo

Terverifikasi Faktual
Dewan Pers
No: 169/DP-Terverifikasi/K/IV/2018

www.gorontalopost.id

TERBIT SENIN- JUMAT | 12 HALAMAN | SENIN, 9 NOVEMBER | TAHUN 2026 | Rp. 10.000,-

https://digital.gorontalopost.id

PEMERINTAH BUKA SELEKSI CPNS

Isi Sejumlah Formasi, Pendaftaran Mulai Bulan Ini

JAKARTA - Pemerintah memastikan akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026. Proses penerimaan aparatur sipil negara (ASN) tersebut direncanakan mulai memasuki tahap pendaftaran pada November ini. Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Bersambung ke **Hal.2**

BAHLIL DIKAITKAN KASUS SADAP

Golkar Diterpa Isu Munaslub

JAKARTA -GP- Belakangan ini ramai di media sosial soal Partai Golkar akan segera menggelar Munaslub.

Bahkan Flyer Munaslub telah beredar di media sosial dan dinarasikan sebagai upaya menyelamatkan Golkar dari Gank Solo. Isu ini juga berhembus bersamaan dengan dugaan penyadapan oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs.

Isu Munaslub ini berhembus setelah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadadia disebut-sebut sebagai Ketum Partai yang terkait dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah Perwira tinggi aktif Polri yang kini telah menjadi tersangka.

Bahlil disebut-sebut bertemu dengan para tersangka beberapa jam sebelum penangkapan.

Bersambung ke **Hal.2**



DISWAY

Oleh: Dahlan Iskan

Layar Marlupi

SAAT MELAYAT Jumat malam kemarin saya ikut bertepuk tangan berkali-kali. Wanita di sebelah saya juga terus bertepuk tangan sambil terisak-isak sedih. Wanita itu putri pertama jenazah yang disemayamkan di situ –di rumah duka Adi Jasa, Surabaya.

Nama wanita terisak itu Anda sudah tahu: Fifi Sijangga. Nama ibunyi yang meninggal pun Anda sudah tahu: Marlupi Sijangga –tokoh legenda balet Indonesia.

Marlupi meninggal di usia 90 tahun –di adat Tionghoa biasa membulatkan angka 89 menjadi 90. Di hari Marlupi meninggal itu nyaris bersamaan dengan usia ke-70 akademi balet yang dia dirikan: Marlupi Dance Academy.

Bersambung ke **Hal.2**



(FOTO: ISTIMEWA)
KEBUTUHAN TAMBANG - Dua unit excavator merek Liugong berwarna kuning yang digunakan mengangkut 295 galon BBM jenis solar atau 10,3 ton, diamankan Satreskrim Polres Pohuwato. Solar yang langka di SPBU itu, diduga akan dipasok ke lokasi pertambangan tanpa izin.



ANGKUT 10,3 TON SOLAR ILEGAL

DUA EXCAVATOR DIAMANKAN DI LOKASI PETI

POHUWATO – GP- Praktik dugaan penyalahgunaan dan pengangkutan BBM jenis solar yang diduga akan digunakan untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali terbongkar di Kabupaten Pohuwato.

Kali ini, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pohuwato mengamankan dua unit excavator merek Liugong berwarna kuning bersama 295 jerigen BBM yang diduga berisi solar sebanyak 10.325 liter di wilayah Kecamatan Taluditi.

Bersambung ke **Hal.2**

GUBERNUR GUSNAR ISMAIL, DAN DIRUT PT BERDIKARI MATANGKAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pacu Pabrik Pakan Ternak, Target Komoditas Unggulan Daerah



(FOTO: DOK-GORONTALOPROV)
MATANGKAN PERJANJIAN - Gubernur Gusnar Ismail (tengah) bersama Dirut PT Berdikari foto bersama usai pertemuan mematangkan perjanjian kerja sama.

RENCANA pembangunan pabrik pakan ternak di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, mulai memasuki tahapan penting. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan PT Berdikari kini mematangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan menjadi pijakan bagi realisasi proyek industri tersebut.

PEMATANGAN kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Gorontalo dengan Direktur Utama PT Berdikari, berlangsung di Jakarta, Kamis (6/11). Pembahasan tidak sekadar menyangkut penandatanganan dokumen, tetapi juga memastikan pembagian tanggung jawab, pemanfaatan lahan, ruang lingkup kerja, hingga mekanisme pembangunan dan pengoperasian pabrik.

Kepastian tersebut menjadi penting agar proyek tidak berhenti pada rencana dan persiapan. Setelah PKS disepakati, kedua pihak diharapkan dapat langsung bergerak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Di balik rencana pembangunan pabrik itu, ada kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar bagi Gorontalo. Selama ini, jagung menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Kehadiran industri pakan ternak diharapkan membuka jalur pemanfaatan hasil pertanian tersebut menjadi produk bernilai tambah, sekaligus memperluas pasar bagi petani.

Bersambung ke **Hal.2**

Pemerintah Buka Seleksi CPNS

dari halaman 1

"Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini akan sudah dilakukan proses pendaftaran," kata Prasetyo.

Dia menjelaskan, pembukaan seleksi CPNS diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan keseimbangan jumlah pegawai di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu pertimbangannya adalah adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun setiap tahun.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan pengisian formasi agar kebutuhan sumber daya manusia di berbagai instansi tetap terpenuhi. Selain menggantikan pegawai yang memasuki masa purnatugas, rekrutmen CPNS juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Menurut Prasetyo, sejumlah agenda strategis membutuhkan dukungan aparatur yang memadai agar implementasinya berjalan optimal. "Karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada program-program pemerintah prioritas yang membutuhkan pengawalan," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo turut mengumumkan kebijakan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan peningkatan status tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik seperti guru dan dosen. Pemerintah juga memasukkan sejumlah profesi lain yang selama ini memberikan pelayanan publik, mulai dari tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran hingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam daftar kenaikan status. "Memutuskan PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada Saudara-Saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar," ujar Prasetyo. "Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan atau tenaga pelaksanaan lain," tambahnya. Tak hanya itu, pemerintah juga membuka peluang bagi pegawai yang telah berstatus PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS. Dengan demikian, mereka tetap memiliki kesempatan untuk beralih status menjadi PNS melalui mekanisme seleksi yang disiapkan pemerintah.

Prasetyo menyebut, salah satu aspek yang tengah menjadi perhatian adalah persyaratan batas usia dalam seleksi CPNS. Pemerintah akan mengkaji kemungkinan pemberian ketentuan khusus bagi PPPK Penuh Waktu pada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan tenaga dengan pengalaman dan keahlian khusus. "Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Nah, kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," jelasnya. Prasetyo menegaskan, rangkaian kebijakan tersebut akan diberlakukan secara bertahap. Pemerintah menetapkan 1 Januari 2027 sebagai waktu mulai pelaksanaan kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan dua langkah sekaligus dalam penataan ASN, yakni membuka penerimaan CPNS baru dan meningkatkan status pegawai PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu. (jp)

Golkar Diterpa Isu Munaslub

dari halaman 1

Soal isu Munaslub dan tudingan terlibat kasus penyadapan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantahnya.

"Jadi itu kira-kira Bapak, Ibu semua. Dan seiring dengan itu, ada juga flyer hoaks-hoaks itu," ucap Bahlil dalam pelantikan pengurus DPD I Golkar Maluku, Sabtu (7/11). Bahlil mengatakan bahwa isu ini merupakan isu murahan untuk mengguncang legitimasi Partai Golkar. Ia menyebut narasi yang dibangun belakangan ini mengarah pada upaya politik pecah belah.

"Yang mau bikin macam-macam, macam-macam, macam-macam gitu lho. Abu lekke kelas tinggi lagi ini. Saya sudah tahu orang-orang itu, saya sudah tahu. Kalian pikir saya orang kampung enggak ngerti? Aku paham," ujarnya.

Bahlil mengatakan, prinsip ia dalam bekerja salah satunya adalah loyal. Ia mengatakan hal itu merupakan ciri khas orang Indonesia bagian Timur. Ia mengatakan bahwa ia takkan menjadi pengkhianat. Bahlil menyebut ia akan selalu setia dengan atasannya.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono juga membantah kabar mengenai rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang ramai beredar di media sosial.

Ia meminta kader Golkar tak mempercayai kabar tersebut. "Informasi mengenai Munaslub yang beredar di media sosial itu tidak benar. Saya meminta masyarakat, khususnya kader Partai Golkar, untuk tidak mempercayai atau menyebarkan informasi yang kebenarannya tidak jelas. Jangan sampai kabar palsu membangun kesan seolah-olah Partai Golkar sedang mengalami konflik internal atau krisis kepemimpinan," tegas Dave, Minggu, 8 November 2026.

Menurut Dave, kemunculan poster tersebut berpotensi memicu kegaduhan sekaligus mengganggu kekompakan internal partai. Ia menilai pencantuman nama sejumlah kader dan penggunaan narasi yang mempertentangkan kelompok tertentu dapat memunculkan gesekan di antara anggota partai.

Padahal, perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam organisasi dan tidak seharusnya dijadikan alat untuk memecah belah kader.

"Partai Golkar tidak boleh dipecah oleh isu yang tidak bertanggungjawab. Membangun pertentangan antarkader, terlebih dengan mencatut nama tokoh partai, tidak memberikan manfaat bagi organisasi. Seluruh kader harus menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh upaya yang dapat mengganggu soliditas partai," ujarnya.

Dave juga mengingatkan seluruh kader untuk menghormati kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Menurutnya, setiap keputusan penting organisasi, termasuk mengenai pergantian kepemimpinan, harus mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta aturan internal partai. "Partai Golkar memiliki aturan dan mekanisme organisasi yang harus dihormati seluruh kader. Fokus kita adalah memperkuat organisasi dan menjalankan tanggung jawab politik kepada masyarakat," tambahnya.

Selain isu Munaslub, Dave turut menanggapi tuduhan yang ditujukan kepada Bahlil Lahadalia, termasuk kabar mengenai dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan. Ia menyebut tuduhan tersebut telah dibantah oleh Bahlil.

Dave menilai tuduhan yang tidak disertai dasar dan bukti kuat dapat mencemarkan reputasi seseorang sekaligus berdampak terhadap kekompakan partai.

Karena itu, ia menyatakan dukungannya terhadap upaya hukum yang ditempuh Bahlil untuk memulihkan nama baiknya.

"Saya mendukung langkah hukum yang ditempuh Bapak Bahlil Lahadalia untuk membela nama baik dan meluruskan tuduhan tersebut. Setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta dan melalui jalur hukum, bukan dengan menyebarkan tuduhan yang belum terbukti," ujar Dave.**(net/disway)**

Layar Marlupi

dari halaman 1

Marlupi sebenarnya punya keinginan di ulang tahun ke-70 akademi tari itu, diadakan pertunjukan balet yang istimewa di Jakarta: di Taman Ismail Marzuki. Memang satu prestasi besar sebuah akademi bisa bertahan sampai umur 70 tahun –bahkan justru terus berkembang lebih maju.

Persiapan pertunjukan terus dilakukan. Bahwa puncak acaranya dilakukan di Jakarta karena pertumbuhan Marlupi Dance Academy terpesat ada di Jakarta: sudah punya lebih 25 cabang. Total lebih 50 cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa 3.500 orang.

Persiapan puncak acara pun sudah matang. Ternyata Marlupi meninggal dunia. Pertunjukan tidak dibatalkan. Justru sekaligus untuk mengantarkan Marlupi menuju surganyi. Pertunjukan itu disiarkan secara live streaming yang bisa ditangkap di ruang jenazah di Surabaya.

Satu layar besar dipasang di ujung ruang duka. Lima layar lainnya disebar di berbagai sudut. Saya duduk satu meja dengan tiga anak Marlupi: si sulung Fifi Sijangga dan si kembar Mar Dwatmadja dan Mar Dwatmadji. Kata "Mar" di depan nama si kembar diambil dari nama mamanya.

Untung saya datang lebih awal: sempat berdoa di depan jenazah, membungkuk tiga kali ke peti, sekali ke arah keluarga di kanan peti, dan sekali ke arah keluarga di kiri peti. Lalu kami sama-sama menuju meja duka untuk mendapat sajian nasi uduk (nasi lemak), wedang ronde, dan berbagai minuman beserta kue. "Sebentar lagi kita nonton live streaming dari Taman Ismail Marzuki Jakarta," bisik Fifi ke telinga saya.

Maka mulailah kami menonton pertunjukan balet ulang tahun ke-70 Marlupi Dance Academy –sekaligus balet pengantar pendirinya ke surga.

Adegan pertama adalah balet kolosal: panggung penuh dengan penari balet. Saya tidak tahu apa judul balet itu. Tapi indah sekali.

Tampilan kedua bikin gemes: balet anak-anak kecil murid akademi. Sekecil itu sudah bisa balet begitu bagus.

"Untuk bisa seperti itu mereka sudah berapa lama berlatih di akademi?"

"Tiga tahun. Setidaknya dua tahun," ujar Fifi sambil terus memperhatikan anak-anak didiknyi di layar. "Umur berapa paling kecil yang bisa diterima di akademi?"

"2,5 tahun," jawab Fifi. "Anak sekarang umur 2,5 tahun sudah pintar-pintar," tambahnyi dalam bahasa Inggris. "Mungkin orang tua sekarang menyiapkan anak mereka lebih baik dibanding zaman dulu," ujar Fifi.

Tiba-tiba tangan Fifi menunjuk ke layar. "Look. That anaknya Pak Syahroni, anggota DPR," ujar Fifi. "Anak beliau masuk akademi yang di Sunter," tambah Fifi.

Pertunjukan keempat terlihat beda. Ternyata mereka adalah guru-guru akademi yang di Jakarta. Mereka tidak mau kalah dengan tampilan murid-murid balet sendiri. "Para guru ingin turut berduka dengan cara menari balet," kata Fifi. Marlupi adalah gurunya para guru itu.

"Pertunjukan berikutnya adalah balet yang paling digemari mama," kata Fifi. "Tuh sudah mulai," tambahnyi.

Oh... ini. Balet yang ini sih saya tahu judulnya: Swan Lake. Penarinya remaja. Saya ikut tidak berkedip. Bagus sekali. Rasanya inilah Swan Lake terbaik yang pernah saya tonton di dalam negeri. Duh kaki-kaki yang lincah yang hanya bertumpu pada ujung ibu jari itu, betapa matangnya mereka. Rasanya tidak kalah dengan Swan Lake yang pernah saya tonton di salah satu panggung balet dunia. Di Leningrad –sekarang St. Petersburg.

"Kalau di mata Anda berapa nilai Swan Lake para remaja di layar itu?" tanya saya kepada Fifi.

"Very good. Seven," jawab Fifi.

Rasanya almarhumah Marlupi ikut tersenyum bangga dari dalam peti jenazah: akademinyi mencapai usia 70 tahun. Yang lebih bangga lagi: dia punya anak segila dirinyi sendiri: Fifi.

Fifi gila balet. Gila beneran. Melebihi gila mamanyi. "Kalau kegilaan mama terhadap balet saya nilai 100, berapa kegilaan Anda?" tanya saya ke Fifi.

"150," jawab Fifi. "Yes. Sure," tambahnyi.

Rasanya saya setuju dengan itu. Anak lebih hebat dari orang tua. Fifi membuktikan itu dengan membuat Marlupi Dance Academy tidak lagi hanya jago kandang. Fifi berani "menantang" Jakarta. Dia melihat Jakarta adalah medan tempur yang lebih besar –yang bila berhasil hasilnya luar biasa.

Fifi berhasil. Tidak mudah. Jakarta tidak kenal Marlupi, apalagi Fifi. Di Jakarta sudah ada buah bibir yang lebih internasional: Farida. Anda sudah tahu siapa Farida –lebih tahu lagi setelah disebut nama lengkapnyi: Farida Syuman.

Farida adalah pebalet pertama Indonesia yang bisa sekolah sampai di ''Harvard''-nya balet: Akademi Balet Bolshoi di Rusia –Uni Soviet saat itu.

Waktu di Rusia itulah Farida kenal dengan mahasiswa Indonesia yang belajar perfilman di sana: Syumanjaya. Mereka pun kawin. Punya dua anak. Cerai. Dua-duanya tetap jadi legenda: Farida di balet, Syumanjaya di penyutradaraan film. Dua-duanya sudah meninggal dunia.

Marlupi pernah belajar balet ke Farida. Sebentar. Lalu belajar ke Singapura, Hong Kong, Swiss, dan Kanada. Fifi disekolahkan balet sampai ''Harvard''-nya balet yang lain: London.

Di tangan generasi kedua, akademi Marlupi berkembang pesat. Kini sudah ada ratusan cabang akademi di seluruh Indonesia –terbanyak di Jakarta. Muridnya tidak hanya dari Indonesia. Juga dari Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya.

"Red Balerina" julukan untuk balerina dari Marlupi, sangat ditakuti oleh peserta lomba balet di Asia. Sudah10 Red Balerina dilahirkan Marlupi yang levelnya sudah dunia. Tiga di antaranya kini sedang dalam puncaknya.

Salah satu dari tiga itu putri Fifi sendiri. Sayang saat sedang tampil di Miami, Amerika, dia cedera punggung. Harus berhenti balet. Untungnya dia punya bakat lain seperti bakat yang dimiliki oma dan mamanyi: bakat mengajar. Tidak semua balerina hebat punya kemampuan mengajar yang baik.

Marlupi Dance Academy kini menjadi akademi balet terbesar di Indonesia –bahkan Asia Tenggara.

Marlupi sendiri ternyata singkatan dari Marry –bunda Maria– dan Dewi Palupi –istri Arjuna yang sangat cantik dan baik hati di dunia pewayangan. Indonesia berutang nama baik di dunia balet kepada Marlupi.

Sudah lebih 30 tahun saya bersahabat dengan keluarga Marlupi yang baik hati. Sejak dulu dia sering datang ke kantor redaksi: bawa sekeranjang lemper. Saya minta kepada Marlupi untuk meramaikan kantor kami yang masih sepi, berantakan, dan belum sepenuhnya jadi: dia mau buka kelas balet di gedung kami. Sampai saya sudah lama meninggalkan gedung itu Marlupi masih di sana. Sampai pun dia meninggal dunia.

Rumah duka malam itu penuh dengan pelayat yang umumnya penari balet. Sesekali saya melirik ke peti jenazah: saya khawatir Marlupi tidak tahan melihat kesedihan mereka lalu bangkit ikut menari di layar balet bersama mereka.(*)

Dua Excavator...

dari halaman 1

Pengungkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti tim Satreskrim Polres Pohuwato pada Jumat (6/11/2026), sekitar pukul 15.30 WITA. Tim yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Pohuwato, IPTU Renly H. Turangan, S.H., bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati satu unit excavator Liugong dengan nomor identifikasi CLG922EZPPE713789 sedang digunakan untuk memuat BBM yang diduga jenis solar sebanyak 160 jerigen. Tak hanya itu, petugas juga menemukan satu unit excavator Liugong lainnya dengan nomor identifikasi CLG922EZHPE713799 yang diduga digunakan untuk membantu proses pemuatan jerigen berisi BBM ke alat berat pertama. Sementara itu, sebanyak 135 jerigen lainnya yang diduga berisi solar masih berada di lokasi dan belum sempat dinaikkan ke atas excavator. Modusnya, eksavator dirancang khusus untuk dapat mengangkut ratusan galon dengan menggunakan box tambangan yang terbuat dari kayu di punggung eksavator. Penggunaan eksavator untuk mengangkut BBM lantaran hanya kenderaan jenis ini yang bisa menembus jalan ke lokasi pertambangan emas tanpa izin.

Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, S.I.K., M.H kepada Gorontalo Post membenarkan pengungkapan dugaan penyalagunaan BBM tersebut. Kapolres mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, BBM tersebut diduga akan dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas pertambangan emas tanpa izin, atau tambang ilegal di wilayah Pohuwato. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan dua unit excavator merek Liugong serta total 295 jerigen yang diduga berisi BBM jenis solar. Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya menjadi bagian dari penanganan perkara oleh Satreskrim Polres Pohuwato untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Pengungkapan ini sekaligus menjadi perhatian serius terhadap dugaan praktik penyalahgunaan BBM jenis solar yang berpotensi menopang aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Pohuwato. "Delapan saksi sedang di periksa, perkembangan lebih lanjut hasil pemeriksaan di laporkan kembali,"tutup Kapolres. **(roy)**

Pacu Pabrik...

dari halaman 1

Pabrik di Tolongio merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Hilirisasi Ayam Terintegrasi. Program ini dirancang bukan hanya membangun fasilitas produksi pakan, melainkan membentuk ekosistem industri peternakan ayam dari hulu hingga hilir.

Rantai usaha yang disiapkan mencakup pemanfaatan jagung sebagai bahan baku, produksi pakan ternak, hingga pengembangan peternakan ayam pedaging atau broiler farm. Jika seluruh mata rantai tersebut berjalan, Gorontalo berpeluang memperoleh nilai ekonomi lebih besar dari komoditas jagung dan sektor peternakan. Dampaknya juga diharapkan menjangkau petani dan pelaku usaha peternakan. Ketersediaan pakan berkualitas dengan harga lebih terjangkau dapat menekan biaya produksi, sementara terbukanya pasar bahan baku memberi peluang bagi petani jagung untuk memperoleh kepastian penyerapan hasil panen.

Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada realisasi proyek dan kesiapan seluruh rantai industrinya. Karena itu, penyelesaian PKS menjadi salah satu pintu penting untuk membawa rencana pabrik pakan Tolongio dari meja pembahasan menuju tahap pembangunan. Kini, tantangannya bukan lagi sebatas merancang kerja sama, melainkan memastikan kesepakatan itu segera diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata. Sebab, nilai strategis pabrik tersebut baru benar-benar terasa ketika industri beroperasi dan manfaatnya sampai ke petani serta peternak Gorontalo. **(tro/*)**

HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO
GORONTALO POST

Penerbit : **PT. GORONTALO CEMERLANG**
Pembina : Dahlan Iskan
Komisaris Utama : Imawan Mashuri
Komisaris : Urief Hasan
Direktur Utama : Moh. Sirham
Direktur : Haryono
Direktur Marketing : Hariyanto Hamzah

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Jitro Paputungan

DIVISI PRODUKSI
Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi:** Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode, M Sonatha
Sekretaris Redaksi/HRD: Chicilia Noviastuti Arifin. **IT:** Luki

DIVISI ART & PERWAJAHAN
Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis:** Muhammad Syukri

DIVISI USAHA
Manager Keuangan: Elvin Ambo. Adriyanti Kadir **(adm)**. **Manager Iklan:** Hariyanto Hamzah.
Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh**. Pemasaran Koran:** Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya **(adm).**

LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN
Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil:** Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial:** Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran:** Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

ALAMAT
Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@ymail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.
Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa TImur.

Redaksi menerima tulisan karya asli, terjemahan, atau saduran (dengan menyebutkan sumber asli bagi karya terjemahan dan saduran). Panjang tulisan antara tiga sampai empat halaman A4 spasi 1,5 dalam bentuk softcopy dan menyertakan identitas diri. Redaksi berhak tidak menerbitkan tulisan yang terkirim, isi tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis. ■ Wartawan Gorontalo Post dibekali dengan kartu pers/surat keterangan ketika menjalankan tugas. ■ Jika ada kejanggalan baik tentang identitas atau tindakan wartawan dapat menghubungi redaksi Gorontalo Post.

Syarat Penerima BSU, Upah Maksimal Rp 3,5 Juta

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026. Pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. Persyaratan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, serta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja/buruh untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli. "Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan



Indah Anggoro Putri

ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026). Indah menjelaskan pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Selain itu, pekerja/buruh harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk pekerja/buruh di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. BSU tidak diberikan kepada pekerja/buruh yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Adapun pekerja/buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. Informasi lebih lanjut mengenai BSU Tahun 2026 dapat diakses melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id atau melalui pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630. **(jpnn)**

Pemerintah Bakal Lanjutkan Tax Holiday

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tetap melanjutkan fasilitas tax holiday untuk menarik investasi asing meski aturan Global Minimum Tax (GMT) berlaku. Airlangga menilai Indonesia tidak perlu terburu-buru menjadi pionir penerapan GMT di kawasan. Pertimbangan ini diambil karena situasi global menunjukkan sejumlah negara masih mengkaji ulang kebijakan pajak minimum internasional tersebut.



Airlangga Hartarto

Dia mencontohkan Kanada yang justru meluncurkan fasilitas insentif perpajakan dengan tarif PPh sebesar 8 persen. Skema insentif yang diluncurkan Kanada tersebut berada jauh di bawah standar GMT yang ditetapkan sebesar 15 persen. Melihat kondisi global yang dinamis tersebut, Indonesia memilih tetap mempertahankan pemberian tax holiday guna menjaga daya tarik investasi nasional.

"Nah bagi Indonesia, tetap memberikan fasilitas termasuk tax holiday, penarik investasi dan untuk hal lain tentu kita akan melihat sesudah diberlakukannya perjanjian perdagangan," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, baru-baru ini. Airlangga menjelaskan persoalan penyelarasan GMT ini nantinya akan dibahas lebih lanjut setelah penandatanganan kerja sama perdagangan internasional.

Salah satunya yakni perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa (EU) yang direncanakan selesai ditandatangani pada 21 November 2026 mendatang.

Di sisi lain, pemerintah juga akan meninjau kembali kepastian aturan mengenai hal tersebut yang pemberlakuannya diduga habis. "Tax holiday nanti kami akan monitor perbaikan daripada PMK," ujar Airlangga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan terkait. **(rom/jpnn)**

LEBEGACOR Program BI Gorontalo Tembus Nasional

Raih Predikat Gold, Edukasi Kesehatan Keluarga Hingga Literasi Ekonomi

GORONTALO - Program LEBEGACOR (Literasi Bersama " Gerakan Cegah Stunting dan Cinta Rupiah) yang digagas Bank Indonesia (BI) Gorontalo meraih predikat Gold dalam ajang GENTING Collaboration Summit 2026 di Jakarta, 5 November 2026.

Penghargaan sebagai Mitra Orang Tua Asuh (OTA) Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) itu diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji.

LEBEGACOR dinilai melalui kontribusi BI Gorontalo dalam mendukung upaya pencegahan stunting melalui pendekatan edukasi kesehatan keluarga yang dipadukan dengan literasi ekonomi dan keuangan.

Sejak diluncurkan pada 10 Maret 2026 di Kabupaten Gorontalo, program tersebut telah menjangkau lebih dari 1.500 Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 10 kecamatan. Hingga September 2026, pelaksanaannya telah memasuki jilid XII. Program ini tidak hanya menyasar pemahaman keluarga tentang pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Masyarakat juga mendapat



(FOTO: DOK- BI GORONTALO)

Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Setya Permana (kiri) menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahiji dalam program Genting Collaboration Summit 2026, di Jakarta.

edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah serta pengelolaan keuangan yang bijak. Edukasi Rupiah dilakukan melalui penyuluhan, diskusi, kuis, hingga praktik mengenali keaslian uang menggunakan metode 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang, serta prinsip 5 Jangan.

Kegiatan tersebut turut disertai edukasi gizi dan bantuan nutrisi bagi keluarga sasaran.

Untuk memperluas jangkauan program, BI Gorontalo juga melatih 113 penyuluh Keluarga Berencana (KB) melalui Training of Trainers (ToT). Mereka berasal dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. **(tro)**



Lagi, Helikopter Jatuh Saat Padamkan Karhutla

Nyemplung ke Sungai Barito, Tiga Crew Selamat

JAKARTA - Helikopter jenis WB Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM dikabarkan jatuh Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel), Ahad (8/11).

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, Helikopter tersebut diduga mengalami kecelakaan ketika menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Armada itu diketahui merupakan helikopter sewaan BNPB yang membawa tiga orang kru.

"Telah terjadi kecelakaan heli WB super puma VH-HGM jatuh ke Sungai Barito," kata Berton kepada wartawan, Minggu (8/11).

Berton juga memastikan helikopter yang mengalami kecelakaan itu merupakan armada yang disewa BNPB untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Ia mengamini, terdapat tiga kru di dalam helikopter saat peristiwa nahas tersebut terjadi. "Crew tiga orang," ucapnya.

Berdasarkan dugaan awal, helikopter Super Puma itu jatuh ketika tengah melakukan pengambilan air untuk kebutuhan pemadaman karhutla.

Dugaan tersebut setelah beredarnya video yang memperlihatkan aktivitas helikopter saat menjalankan misi tersebut. Meski demikian, Berton menegaskan BNPB masih mengumpulkan informasi untuk memastikan kronologi dan aktivitas helikopter sebelum kecelakaan terjadi.

"Kalau lihat videonya demikian (sedang angkut air), nanti kami sampaikan setelah informasi utuh,"katanya. Armada tersebut membawa tiga orang kru penerbangan dan berdasarkan laporan pendahuluan yang diterima BNPB, seluruhnya dipastikan selamat, sementara tim terkait masih bersiaga di lapangan untuk menangani perkembangan pascakecelakaan.

Helikopter dengan nomor seri pabrikan atau Manufacturer Serial Number (MSN) 2878 itu merupakan armada milik perusahaan swasta yang dikontrak BNPB untuk mendukung operasi pemadaman karhutla melalui pengerahan kekuatan udara. **(jp)**



(FOTO: ISTIMEWA)

UPAYA Evakuasi crew Helikopter jenis WB Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM dalam misi pemadaman karhutla yang jatuh di sungai Barito, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Ahad (8/11).



FOTO : NOVA DISKOMINFOTIK.

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie bersama seluruh perwakilan DPD dan DPC KKIG maupun jajaran tamu undangan yang lain pada malam pembukaan Kongres V KKIG yang berlangsung di Aula Yiladia, Rumah Jabatan Wali Kota Gorontalo, Jumat malam (6/11/2026).

Idah Harap KKIG Lahirkan Gagasan Besar untuk Gorontalo

GORONTALO-Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie berharap Kongres Nasional Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) dapat melahirkan gagasan dan pemikiran besar untuk mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Kongres V KKIG yang berlangsung di Aula Yiladia, Rumah Jabatan Wali Kota Gorontalo, Jumat (6/11/2026) malam.

Mengusung tema "Merawat Kebersamaan, Menjaga Persaudaraan, Memperkokoh Persatuan dalam Membangun Negeri" (Dulo Ito de Kongres), kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat peran warga Gorontalo, baik yang berada di daerah maupun di perantauan.

Dalam sambutannya, Idah menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di Bumi Hulondalo. Ia mengajak seluruh keluarga besar KKIG untuk terus menjaga kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya, dan berbagai potensi yang dimiliki Gorontalo. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai organisasi, terutama KKIG. Karena itu, saya berharap KKIG dapat terus menjadi mitra pemerintah dan mengambil bagian dalam mendorong pembangunan Provinsi Gorontalo," ujar Idah. Ia juga mengapresiasi kehadiran para peserta yang dinilai turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kedatangan warga perantauan yang membawa buah tangan untuk keluarga maupun membeli oleh-oleh saat kembali ke daerah masing-masing menjadi peluang bagi pelaku UMKM lokal. Selain itu, rencana penyewaan 250 bentor selama kegiatan berlangsung juga dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pengemudi bentor. Idah berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. "Saat ini kita masih menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Kondisi ini membutuhkan sentuhan dan bantuan bagi masyarakat. Walaupun bantuan yang diberikan tidak seberapa, tetapi yang terpenting ada kepedulian dan upaya kita bersama untuk membantu serta memajukan masyarakat Gorontalo," tutur Idah. **(tro)**

Kabareskrim Bantah Kabar Mendagri Ditangkap

JAKARTA - Isu seputar penyadapan kepada Presiden Prabowo makin meluas dan menyasar banyak nama yang terlibat. Bahkan di media sosial dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, diperiksa terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap orang nomor satu di Indonesia saat ini. Informasi tersebut menjadi perbincangan warganet setelah tersebar melalui sejumlah unggahan.

Salah satunya muncul melalui akun Instagram @kritikkerass. Akun tersebut mengunggah narasi yang menyebut adanya seorang menteri berinisial TK yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan dan bakal ditahan. "INFONYA ADA MENTERI YANG DITAHAN MALAM INI KARNA TERLIBAT PENYADAPAN PRABOWO INISIAL TK," tulis keterangan dalam akun tersebut.

Menanggapi kabar yang beredar, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin membantah adanya pemeriksaan terhadap kedua mantan Kapolri tersebut. Ia menegaskan, informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial itu tidak benar.

"Infonya tidak benar," kata Asep Safrudin kepada wartawan pada Minggu (8/11). Ia menekankan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh negara masih terus berjalan. Bahkan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tengah menyiapkan pembentukan tim khusus untuk mengusut kasus tersebut. Tim ini akan berada di bawah koordinasi Kabareskrim Polri.

Pengusutan kasus tersebut difokuskan pada dugaan tindak pidana ilegal akses berupa penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Dalam perkembangan perkara ini, penyidik disebut telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka. Keempat tersangka itu yakni, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 32 ayat (1). **(jp)**



Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin (tengah) dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Fraksi PAN MPR Minta Gibran Sukarela Mundur

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Syarifuddin Sudding, meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Hal itu didasari putusan MA sebagai tertuang dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026. Putusan kasasi itu diajukan oleh Subhan Palal terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan milik putra mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Dalam amar putusannya, MA menyatakan Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan juga memerintahkan agar dokumen tersebut dimusnahkan oleh pihak yang menguasainya. Ia menegaskan, dokumen yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 dinilai memiliki konsekuensi serius terhadap legitimasi jabatan yang kini diemban Gibran. "Dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat. Sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung, kalau yang bersangkutan tidak mundur, harus ada eksekusi lewat jalur politik," kata Sudding kepada wartawan pada Ahad (8/11). Atas dasar itu, Sudding menyarankan Gibran mengambil sikap dengan melepaskan jabatannya secara sukarela. Langkah tersebut diperlukan untuk menghormati putusan pengadilan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. "Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Apalagi sudah tidak memiliki legitimasi secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi. Secara moral, ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat karena jabatan wakil presiden merupakan jabatan publik," tegasnya. Sudding menegaskan, apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, DPR dapat mempertimbangkan penggunaan kewenangan konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut. Dia menyebut hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan DPR dalam menindaklanjuti persoalan ketatanegaraan tersebut. Mekanisme itu, lanjut Sudding, dapat menjadi bagian dari proses politik dengan menjadikan putusan MA sebagai dasar pertimbangan. "Kalau dia tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap melalui hak menyatakan pendapat, dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," ucap Sudding. Ia memandang, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan. Proses pemberhentian tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR melalui tahapan yang telah ditentukan dalam konstitusi. Selain menyorotiputusan MA, Sudding turut menanggapi aksi penurunan foto wakil presiden yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jogjakarta. Dia menilai tindakan tersebut merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap perkembangan persoalan yang menyangkut ketatanegaraan. Meski demikian, Sudding mengingatkan agar polemik tersebut diselesaikan melalui jalur konstitusional. Dia berharap, DPR segera menentukan sikap setelah masa reses berakhir sehingga prinsip negara hukum tetap ditegakkan. "Saya melihat harus ada langkah konkret terhadap putusan Mahkamah Agung itu supaya prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan konstitusi, benar-benar menjadi pilar utama dalam ketatanegaraan kita," pungkasnya**. (jp)**



Syarifuddin Sudding

BUPATI CANANGKAN HUT KE 353 KABGOR

Pemerataan Pembangunan Hingga Pelosok



(FOTO: DOK - DISKOMINFO)

SEMANGAT MEMBANGUN - Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, bersama Wakil Bupati Tony Yunus, dan jajaran Pemda Kabupaten Gorontalo mencanangkan HUT ke 353 Kabupaten Gorontalo, Sabtu (7/11).

LIMBOTO - Pembangunan Kabupaten Gorontalo tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat pemerintahan. Manfaatnya harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa-desa di pelosok. Pesan itu ditegaskan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi saat mencanangkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-353 Kabupaten Gorontalo, Sabtu (7/11/2026).

Sofyan menyebut usia 353 tahun Kabupaten Gorontalo harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan yang merata dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, kemajuan daerah tidak cukup diukur dari kemeriahan perayaan, tetapi dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

"Kebersamaan adalah modal utama. Mari kita semarakkan kembali geliat pembangunan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, memastikan manfaatnya menyentuh hingga ke pelosok,"kata Sofyan.

Pencanangan HUT kali ini juga diwarnai penyaluran 353 paket sembako kepada masyarakat penerima manfaat.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi yang diarahkan agar turut dirasakan masyarakat. Selain itu, kegiatan di Lapangan Sport Center Limboto diisi senam massal bersama kader PKK dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antarpemerintah desa untuk memperkuat kolaborasi pembangunan.

Rangkaian pencanangan diawali defile ribuan peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Peserta bergerak dari halaman Kantor Bupati Gorontalo menuju Lapangan Sport Center Limboto. Hujan yang mengguyur Limboto tidak menghentikan jalannya kegiatan.

Memasuki usia ke-353, tantangan pemerintah daerah bukan sekadar menjaga kemeriahan perayaan tahunan, melainkan memastikan pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan benar-benar menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo. **(adv)**

JUMBARA PKK DAN POSYANDU

Pesan Bupati Pererat Persaudaraan

LIMBOTO - Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, secara resmi menutup rangkaian kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) PKK dan Posyandu tingkat Kabupaten Gorontalo yang berlangsung selama empat hari. Penutupan kegiatan tersebut ditandai dengan pesan penting tentang penguatan persaudaraan, kebersamaan, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat. Jumbara yang diikuti oleh kader PKK dan Posyandu dari seluruh desa, kelurahan, dan kecamatan se-Kabupaten Gorontalo itu berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan kebersamaan. Dalam sambutannya, Bupati Sofyan Puhi menegaskan bahwa Jumbara tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, tetapi memiliki makna yang lebih mendalam, yakni mempererat tali persaudaraan, meneguhkan komitmen, serta mengevaluasi pelaksanaan program PKK dan Posyandu di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. "Kegiatan ini tidak sekadar perlombaan, tetapi intinya adalah dalam rangka mempererat persaudaraan, meneguhkan komitmen, serta mengevaluasi seluruh program PKK dan Posyandu di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan," ujar Sofyan. Ia juga menekankan bahwa pengumuman juara dan penyerahan piala pada akhir kegiatan hanyalah bagian dari upaya memberikan motivasi kepada para peserta. Menurutnya, esensi utama Jumbara terletak pada terbangunnya kebersamaan dan semangat untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. "Ini semua adalah penyemangat kita. Tujuan kita bukan sekadar untuk menjadi juara, tetapi bagaimana kebersamaan dan kekeluargaan kita bisa terjalin lebih erat. Bukan pada nilai, namun pada motivasinya untuk terus bekerja yang terbaik di masyarakat" tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kontribusi seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan piagam penghargaan serta bonus kepada para pemenang lomba. Selain itu, apresiasi khusus juga diberikan oleh Rahmiati Yahya berupa dukungan anggaran sebesar Rp6,8 juta untuk setiap TP-PKK kecamatan. Sofyan mengungkapkan, bantuan tersebut telah diserahkan pada kegiatan sebelumnya, mulai pagi hingga siang hari, dengan mekanisme transfer kepada masing-masing Ketua TP-PKK kecamatan untuk selanjutnya dibagikan di wilayah masing-masing. "Tadi pagi hingga siang hari, Bunda Rahmiati Yahya telah memberikan bonus kepada seluruh PKK se-kecamatan, masing-masing Rp6,8 juta per kecamatan yang ditransfer ke Ketua TP-PKK Kecamatan untuk kemudian dibagikan di kecamatan masing-masing," ungkap Sofyan.



(FOTO: DOK-DISKOMINFO)

Jumbara yang diikuti oleh kader PKK dan Posyandu dari seluruh desa, kelurahan, dan kecamatan se-Kabupaten Gorontalo berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan kebersamaan.

Tidak hanya itu, bingkisan atau kado bagi TP-PKK desa juga turut disalurkan melalui penggerak PKK di tingkat kecamatan sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap para kader. Mengakhiri sambutannya, Bupati Sofyan Puhi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh peserta serta pihak yang telah berpartisipasi dan menyukseskan pelaksanaan Jumbara PKK dan Posyandu tingkat Kabupaten Gorontalo. Dengan penuh rasa syukur, ia secara resmi menutup seluruh rangkaian kegiatan sekaligus menyampaikan harapan agar kebersamaan dan semangat pengabdian para kader terus terjaga hingga pelaksanaan Jumbara tahun berikutnya. **(adv)**

PEBALAP BINAAN AHM

Resky Rebut Podium IM4AC Qatar

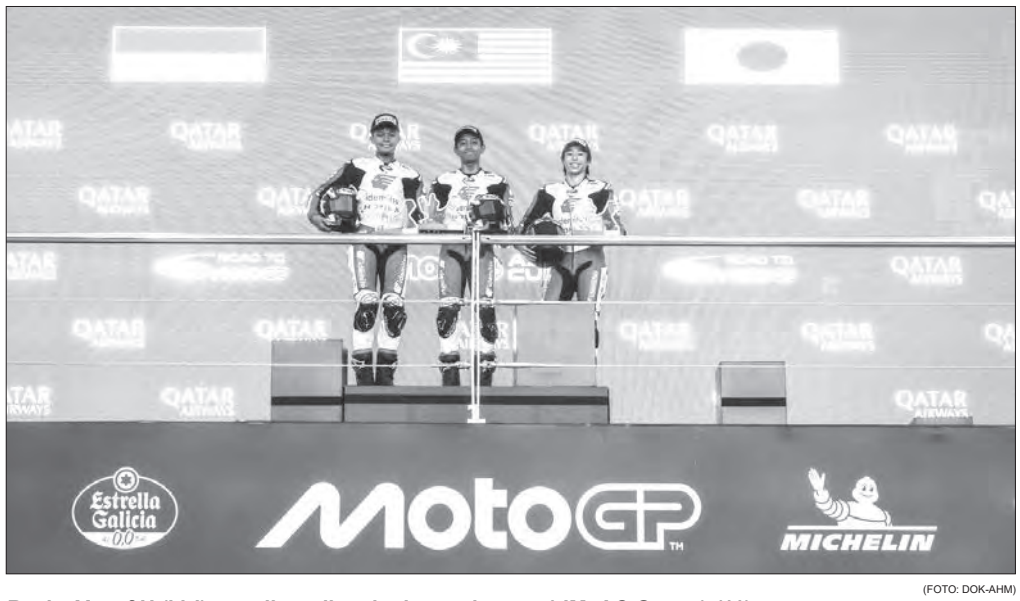
QATAR - Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM), Resky Yusuf Hermawan, mengamankan podium kedua pada race pertama Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) putaran keenam di Sirkuit Lusail, Qatar, Sabtu (7/11/2026). Hasil tersebut melengkapi penampilan kompetitif pebalap binaan AHM lainnya. Bintang Pranata Sukma finis di posisi keempat, disusul Muhammad Badly Ayatullah di urutan kelima. Sementara M. Maulana Malik mengakhiri balapan di posisi kesembilan.

Persaingan di kelompok depan berlangsung ketat sebelum balapan dihentikan lebih awal akibat insiden yang memicu pengibaran bendera merah (red flag) pada lap ke-10. Bagi Resky, podium ini menjadi hasil istimewa dalam penampilan perdananya di Sirkuit Lusail.

Meski mengaku kecewa karena balapan tidak berlangsung hingga akhir, ia tetap menjadikan hasil tersebut sebagai modal menghadapi race kedua. "Alhamdulillah bisa meraih podium di balapan pertama saya di Sirkuit Lusail Qatar. Saya belum puas dan akan berusaha lebih baik lagi di race 2 dengan seluruh kemampuan saya," ujar Resky.

Bintang juga mengaku memiliki kecepatan untuk bersaing di barisan depan. Ia menyebut keselamatan menjadi hal utama setelah balapan terhenti akibat insiden.

Sementara itu, Badly menunjukkan upaya mengejar posisi depan setelah memulai balapan dari urutan ke-15. Ia mengaku peluang untuk menembus podium mulai terbuka sebelum red flag menghentikan persaingan. Maulana, yang sempat kesulitan pada awal lap, juga mencatat peningkatan kecepatan dibandingkan sesi sebelumnya. Namun, penghentian balapan membuatnya harus puas finis di posisi kesembilan. Keempat pebalap tersebut kini mengalihkan fokus ke race kedua untuk kembali bersaing dan memperbaiki hasil di putaran Qatar. **(tro)**



(FOTO: DOK-AHM)

Resky Yusuf H (kiri) meraih podium kedua pada race 1 IM4AC Qatar (7/11).

Kurangi Sampah Rumah Kompos Tanjung Keramat Diapresiasi

GORONTALO-GP- Pengelolaan sampah perkotaan membutuhkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Salah satu upaya yang dinilai potensial adalah pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos seperti yang dilakukan melalui Rumah Kompos di Kelurahan Tanjung Keramat, Kota Gorontalo.

Keberadaan fasilitas tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Marwan Pasue. Rumah Kompos Tanjung Keramat merupakan salah satu langkah konkret dalam mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan ekonomi.

Menurut Marwan, fasilitas pengolahan sampah organik tersebut perlu mendapat perhatian dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah kota. Sebab, potensinya cukup besar dalam membantu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini menjadi persoalan perkotaan.

"Rumah kompos ini adalah langkah konkret untuk mengurangi tumpukan sampah di setiap kelurahan. Selain itu, ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga kebersihan kota," ujarnya.

Ia menjelaskan, sampah organik yang selama ini dianggap sebagai limbah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan apabila dikelola dengan baik. Pengolahannya menjadi pupuk kompos tidak hanya mengurangi beban sampah, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan.

Potensi tersebut terlihat dari komposisi sampah yang masuk ke Rumah Kompos Tanjung Keramat. Berdasarkan data pengelolaan, sekitar 79 persen merupakan sampah organik, sedangkan sampah anorganik sebesar 3 persen dan residu mencapai 14 persen. Dalam periode Juni hingga Desember 2025, fasilitas tersebut bahkan mampu menghasilkan pupuk kompos sebanyak 2.810 kilogram atau sekitar 2,8 ton.

Capaian itu, menurut Marwan, menunjukkan bahwa sampah memiliki potensi untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena itu, keberadaan rumah kompos perlu terus dikembangkan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Ini dapat menjadi edukasi bagi warga bahwa sampah bukan hanya untuk dibuang, tetapi bisa diolah menjadi manfaat ekonomi," ungkapnya.

Meski demikian, Marwan mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas yang disediakan pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga juga menjadi faktor penting.

Ia menilai, kebiasaan mencampur seluruh jenis sampah dalam satu tempat akan menyulitkan proses pengolahan. Akibatnya, sampah yang sebenarnya masih memiliki nilai manfaat justru berakhir di tempat pembuangan akhir. "Tanpa kebiasaan memilah sampah, proses pengolahan akan semakin sulit. Akibatnya, beban pengelolaan tetap bertumpu pada armada pengangkutan dan kapasitas TPA," jelas aleg Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Kota Selatan, Hulonthalangi, dan Dumbo Raya itu.

Marwan berharap, Rumah Kompos Tanjung Keramat tidak hanya menjadi fasilitas pengolahan, tetapi juga pusat edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya.

Ia juga mendorong agar pola pengelolaan serupa dapat dikembangkan di wilayah lain. Terlebih, Rumah Kompos Tanjung Keramat diketahui menjadi satu-satunya fasilitas rumah kompos yang ada di Gorontalo.

Terakhir Dekot berharap inovasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga menjadi salah satu solusi dalam mengurangi beban persampahan di Kota Gorontalo. **(Adv)**

Dekot Minta Pemkot Serius Tangani Tiga Jembatan Rusak



(F. DIYANTI/GORONTALO POST)

Dokumentasi rapat paripurna tiga Ranperda Usul Eksekutif yang digelar Dekot di Aula I, Senin (2/11/2026).

Totok Minta Sarana Prasarana Dikelola Secara Terstruktur

GORONTALO-GP- Pengelolaan aset daerah dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius. Pasalnya, masih terdapat sejumlah aset yang belum tertangani secara maksimal, mulai dari kendaraan dinas hingga fasilitas pendidikan.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Totok Bachtiar, mengatakan pengelolaan aset tidak cukup hanya sebatas pendataan. Pemeliharaan dan penanganan aset juga perlu dilakukan secara terstruktur agar tidak berakhir rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.

"Bukan kendaraan yang tidak dipakai, tetapi kendaraan yang memang sudah rusak berat atau rusak fatal karena tidak ada yang mengurus," ujar Totok

Menurut Totok, persoalan tersebut dapat ditemukan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki banyak aset. Salah satunya



Totok Bachtiar

Dinas Pendidikan yang memiliki cukup banyak kendaraan dinas serta fasilitas pendukung pendidikan.

Namun, pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan tersebut dinilai belum ditangani secara khusus. Kondisi itu membuat berbagai persoalan aset berpotensi tidak tertangani dengan cepat.

"Di dinas besar seperti Dinas Pendidikan, kendaraan dinasnya banyak. Tetapi tidak ada yang secara khusus mengurus sarana dan prasarana," jelasnya.

Totok juga menyoroti kondisi fasilitas sekolah yang membutuhkan penanganan. Mulai dari bangunan yang mengalami kebocoran, sekolah terdampak banjir, hingga perabot yang mengalami kerusakan.

Selama ini, penanganan berbagai persoalan tersebut masih dirangkap oleh bidang pendidikan dasar (Dikdas).

Menurut Totok, pola tersebut membuat pengelolaan sarana dan prasarana belum dapat dilakukan secara optimal karena tugasnya cukup luas.

Karena itu, ia mendorong adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang lebih terstruktur.

Pengelolaan tersebut mencakup aset bergerak maupun tidak bergerak, termasuk kendaraan dinas, bangunan dan fasilitas pendidikan.

"Termasuk kendaraan, bangunan, dan seluruh fasilitas pendidikan. Harapannya, aset daerah bisa terdata, terawat, dan tidak lagi terbengkalai," pungkas Totok. **(Adv)**

Kerusakan Bertahun-tahun, Heriyanto Ingatkan Risiko Keselamatan Warga

GORONTALO-GP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo meminta pemerintah kota memberi perhatian terhadap kerusakan tiga jembatan penghubung di Kelurahan Biawu dan Biawao, Kecamatan Kota Selatan. Infrastruktur yang telah rusak sejak 2019 itu dinilai membutuhkan penanganan segera karena menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat.

Anggota Dekot Gorontalo, Heriyanto Thalib, mengatakan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam penanganan infrastruktur.

Menurutnya, tiga jembatan yang mengalami kerusakan masing-masing berada di jalur penyeberangan orang penghubung Kelurahan Biawu dan Biawao, kawasan Pasar Jajan, serta akses menuju permukiman warga yang menghubungkan masyarakat dengan masjid dan sekolah.

Heriyanto menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, keberadaan jembatan memiliki fungsi penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perdagangan di Pasar Beringin Biawu dan Pasar Jajan.

"Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, akses ini sangat dibutuhkan warga. Sehingga perlu ada perhatian dari pemerintah



Heriyanto Thalib

kota," tegas Heriyanto.

Legislator Komisi I Dekot Gorontalo itu mengungkapkan, kerusakan jembatan juga berdampak terhadap aktivitas sosial masyarakat. Apalagi, salah satu akses tersebut digunakan warga untuk menuju tempat ibadah dan sekolah.

Ia menyayangkan kondisi jembatan yang hingga kini belum mendapat perbaikan menyeluruh. Bahkan, warga harus berinisiatif melakukan penanganan sementara secara swadaya dengan memasang papan untuk menutupi bagian lantai yang berlubang.

Bagi Heriyanto, langkah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan akses yang aman, tetapi penanganan secara swadaya tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang.

Karena itu, ia meminta Pemkot Gorontalo tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan sebelum mengambil langkah perbaikan. Pemerintah perlu memastikan kondisi infrastruktur yang digunakan masyarakat setiap hari berada dalam keadaan aman.

"Jangan sampai sudah ada korban baru melakukan perbaikan," ujarnya.

Dekot berharap pemerintah kota segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui OPD teknis terkait. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terhadap akses penghubung yang layak tidak terus terabaikan. **(Adv)**











KUNJUNGAN Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo di lokasi titik nol pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Pilohayanga, Minggu (8/11/2026).

Komisi III Tinjau Rehabilitasi Irigasi Pilohayanga

PUNCAK BOTU - GP - Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan lokasi titik nol pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Pilohayanga, Minggu (8/11/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026, sekaligus melihat langsung kondisi infrastruktur irigasi yang akan direhabilitasi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menjelaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi DI Pilohayanga mulai dilaksanakan sejak 2 November 2026 oleh PT Brantas Abipraya selaku BUMN pelaksana proyek Inpres yang bersumber dari APBN.

Menurut Espin, bendungan dan jaringan irigasi Pilohayanga sudah berusia kurang lebih 20 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi untuk menjaga fungsi dan keberlanjutan pelayanan air bagi para petani.

Ia menyampaikan, pekerjaan rehabilitasi tersebut masuk dalam empat paket kegiatan yang mencakup DI Pilohayanga, DI Dulupi-Tongo, salah satu daerah irigasi di Kabupaten Gorontalo Utara, serta DI Bulia.

"Pekerjaan sudah mulai berjalan, khususnya pada bagian atas. Kami berharap pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama para petani yang selama ini bergantung pada jaringan irigasi tersebut," ungkap Espin.

Sementara itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo melalui Bidang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa sebelum pekerjaan dimulai, telah dilaksanakan sosialisasi bersama pihak terkait pada 2 November 2026.

Dalam sosialisasi tersebut disepakati bahwa pengerjaan akan lebih dahulu dilakukan pada lokasi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pengambilan air. Pengaturan jadwal pekerjaan juga disesuaikan dengan sistem buka-tutup aliran air agar tidak mengganggu kebutuhan petani, khususnya mereka yang tanaman padinya sudah mendekati masa panen.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, pekerjaan fisik mulai terlihat melalui pembongkaran lining pada ruas bangunan BPLKR 4 dan BPLKR 5 menuju perempatan lampu merah di Desa Luhu.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifuddin Bano, menambahkan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan program Inpres Nomor 2 Tahun 2026 yang mencakup delapan pekerjaan infrastruktur di Provinsi Gorontalo dan terbagi dalam dua paket pekerjaan.

Ia menyebutkan, khusus untuk rehabilitasi DI Pilohayanga, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp28 miliar. Sementara DI Bulia dan sekitarnya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp22 miliar hingga hampir Rp23 miliar.

Syarifuddin berharap pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya para petani. Menurutnya, program Inpres menjadi salah satu sumber dukungan penting bagi pembangunan infrastruktur irigasi di tengah keterbatasan alokasi anggaran melalui skema pendanaan lainnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi pekerjaan untuk ikut melakukan pengawasan bersama agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik.

Selain itu, Syarifuddin meminta pihak pelaksana agar dapat melibatkan tenaga kerja lokal di sekitar lokasi proyek sehingga masyarakat setempat turut memperoleh manfaat ekonomi dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi irigasi, baik dari sisi kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian maupun keberlanjutan pelayanan air bagi lahan pertanian masyarakat.**(rmb)**

Komisi IV Dorong Bantuan UEP Berkelanjutan

Pantau Usaha Warga di Telaga Biru

PUNCAK BOTU - GP - Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring pemanfaatan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (7/11/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan usaha penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan pemerintah dimanfaatkan dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, salah satu penerima manfaat, Irwanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang telah diterimanya. Ia berharap dukungan pemerintah dapat terus berlanjut agar usahanya semakin berkembang dan mampu meningkatkan kapasitas produksi.

Menurut Irwanto, kendala yang masih dihadapi dalam mengembangkan usaha adalah keterbatasan peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi. Selain itu, pemasaran juga menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berharap program UEP dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Komisi IV juga menegaskan pentingnya pemantauan secara berkelanjutan terhadap perkembangan usaha penerima manfaat, sehingga berbagai kendala yang dihadapi dapat menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah.

Melalui kegiatan monitoring ini, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya sebatas pemberian bantuan, tetapi juga diikuti dengan pendampingan dan dukungan berkelanjutan agar usaha yang dijalankan dapat tumbuh dan mandiri.**(rmb)**



KUNKER Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (7/11/2026).

Penanganan Anak Tidak Sekolah Butuh Sinergi Lintas Sektor

Dikbud Gorontalo Perkuat Validasi Data hingga Tingkat Sekolah

GORONTALO-GP- Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Gorontalo membutuhkan penanganan yang lebih terarah. Tidak hanya melalui program pendidikan, tetapi juga koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan anak-anak yang belum mengenyam atau tidak lagi melanjutkan pendidikan dapat kembali memperoleh akses belajar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, mengatakan penanganan ATS tidak bisa dibebankan kepada satu instansi. Dukungan data yang akurat dan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar langkah penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Penanganan anak tidak sekolah memerlukan dukungan data yang akurat serta langkah konkret agar setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak," kata Sudarman, Rabu (4/11).

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah kesesuaian data administrasi dengan kondisi faktual. Karena itu, proses verifikasi dan validasi perlu dilakukan secara berkala, bahkan hingga tingkat satuan pendidikan dan individu.

Upaya tersebut dibahas dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang digelar Dikbud Provinsi Gorontalo, Selasa (3/11). Pertemuan itu melibatkan perangkat daerah, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 340/9/VIII/2026 tentang Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Penanganan ATS. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menyatukan langkah dalam memperbaiki pendataan sekaligus merumuskan strategi penanganan.

Dalam pembahasan, perhatian diarahkan pada penguatan verifikasi dan validasi data ATS jenjang SMA, SMK, dan SLB. Selain pemaparan data ATS tingkat provinsi, peserta juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mendorong satuan pendidikan lebih aktif menelusuri peserta didik yang tidak lagi aktif bersekolah. Termasuk mengidentifikasi lulusan SMP yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK.

Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan lebih awal sebelum anak benar-benar terputus dari akses pendidikan. Data yang diperoleh juga diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi sesuai persoalan masing-masing anak.

Selain pendataan, hasil diskusi turut menekankan pentingnya memasukkan penanganan ATS dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) ATS. Penguatan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah juga menjadi bagian dari kesepakatan.

Sebagai tindak lanjut, Dikbud Provinsi Gorontalo akan menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan verifikasi dan validasi data ATS. Langkah ini diharapkan mendorong satuan pendidikan dan perangkat daerah melakukan pendataan secara lebih teratur, sehingga anak-anak yang membutuhkan intervensi dapat teridentifikasi dengan tepat.

Penanganan ATS pun diharapkan tidak berhenti pada pembaruan data, tetapi berlanjut pada langkah nyata untuk mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan. **(Tr-76)**

AS ROMA IMPIKAN SCUDETTO

SERIE A

AS ROMA masih belum kalah di Liga Italia. Mereka terima saja disebut salah satu kandidat juara tahun ini yang sudah lama mereka impikan, tapi tak mau lupa bersenang-senang. Roma melanjutkan start tak terkalahkan dengan menghabisi Sassuolo 3-0 di Olimpico, Minggu (8/11) dini hari WIB. Itu berarti I Lupi sudah meraih delapan kemenangan dan tiga kali seri.**(net)**



PREMIER LEAQUE



The Citizens Babak Belur di Hajar Nottingham Forest 3-0

Manchester City dipermalukan NottinghamForest 0-3 di The City Ground. Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun di Liga Inggris. Tim yang selama ini tampil ganas disetiap laga Premiere Leaque tak mampu mengimbangi perlawanan keras tim yang tak diperhitungkan di Liga bergengsi top dunia ini.**(net)**

BUNDESLIGA

Harry Kane Teken Kontrak Bersama Bayern Hingga 2029

Harry Kane memastikan BayernMunich tetap jadi klubnya musim depan. Sebab, Kane baru saja meneken kontrak baru bersama tim Bavaria itu.Bayern mengumumkan secara resmi, Kamis (5/11/2026) siang WIB, terkait kontrak baru Kane tersebut. Kane akan berseragam DieRoten sampai 2029 setelah kontrak lamanya berakhir musim panas nanti.



LA LIGA



Jose Mourinho Mulai Ragukan Performa Vinicius

ViniciusJr sedang tidak baik-baik saja situasinya di Real Madrid. Muncul kabar, pelatih Jose Mourinho mulai ragu kepadanya!

Dilaporkan Marca, ada informasi dari sumber orang dalam di Real Madrid. Pelatih Jose Mourinho mulai meragukan Vinicius Jr.

Performa Vinicius jauh dari kata memuaskan. Dua hal yang digarisbawahi adalah soal Vini yang kurang tajam saat menusuk ke kotak lawan dan kurang tangguh ketika bertahan.**(net)**

■ MOTO3 QATAR 2026



Saingan Berat Veda Ega Hanya Finis Posisi 8

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama finis di posisi kedelapan dalam Kualifikasi Moto3 Qatar 2026 di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11) malam.Awalnya MaximoQuiles menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 02:03,025 detik. Pada urutan kedua ada David Munoz, diikuti Adrian Fernandez dan Veda Ega. Namun ini tidak bertahan lama.Sejurus kemudian David Almasa menjadi yang tercepat dengan waktu 02:02,781 detik, diikuti Alvaro Carpe.

Pada saat yang sama posisi Veda melorot ke urutan kedelapan dengan selisih 1,252 detik. Setelah kualifikasi berjalan 10 menit, situasi di papan atas tidak banyak berubah. Quiels, Almansa, dan Carpe masih menjadi tiga terbaik. Pada saat yang sama Veda tetap di urutan kedelapan.**(net)**

MOTOGP QATAR 2026 ■

DEKATI GELAR JUARA

Marc Marquez Masih Harus Kerja Keras

Marquez saat ini masih memimpin klasemen dengan koleksi 411 poin. Keunggulan 49 poin belum membuat Marquez aman.Setidaknya, dia butuh 25 poin tambahan dalam balapan utama nanti dan berharap agar Martin tak mendulang angka di Qatar.

Dengan situasi itu, tercipta jarak 74 poin antara Marquez dan Martin.Dari kondisi inilah, Marquez akan menjadi juara. Tapi, jika Martin bisa menang atau setidaknya meraih poin, maka gelar Marquez akan tertunda.

POSISI LIMA BESAR MASIH KETAT

Persaingan ketat sebenarnya masih tersaji dalam perebutan posisi lima besar. Masih banyak pembalap yang bisa merangsek finis di lima besar karena jaraknya sangat tipis.Setidaknya, Pedro Acosta, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, bahkan Raul Fernandez, masih bisa finis di lima besar dengan 99 poin yang tersisa dari balapan utama di MotoGP Qatar plus dua seri tersisa lainnya.**(net)**



Pabrik Emas Ilegal Digrebek



Ilustrasi penangkapan empat tersangka Pengolahan emas tanpa ijin resmi alias ilegal.

Empat Tersangka Dibekuk Polda Gorontalo

GORONTALO-GP - Praktik pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin di Kabupaten Bone Bolango akhirnya terbongkar. Ini setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo, menangkap empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam aktivitas pengolahan emas ilegal.

Keempat tersangka diamankan dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dengan aktivitas pengolahan emas di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Penahanan dilakukan pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 05.00 Wita. Keempatnya kini mendekam di Rumah Tahanan Polda Gorontalo.

Kapolda Gorontalo melalui Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa penahanan tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian penyidikan yang telah dilakukan kepolisian.

Sebelum menetapkan status tersangka, penyidik terlebih dahulu melaksanakan gelar perkara. Selanjutnya, pada 6 November 2026 diterbitkan surat penangkapan dan surat perintah penahanan. Kasus ini ditangani berdasarkan dua laporan polisi dan dua surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 20 September 2026. Maruly menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi praktik pengolahan dan pemurnian hasil tambang yang dilakukan tanpa izin resmi. "Kami tidak akan mentolerir setiap tindakan yang melanggar hukum terkait pengolahan hasil tambang tanpa izin," tegas Maruly.

Empat tersangka yang kini ditahan diketahui berasal dari Kabupaten Bone Bolango. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam aktivitas pengolahan emas tersebut. Mereka masing-masing berinisial RP yang berperan sebagai pemilik tromol, serta SK, IL, dan BA yang diduga sebagai pemilik tempat rendaman pengolahan emas. Para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta ketentuan Pasal 20 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penahanan empat tersangka ini tampaknya belum menjadi akhir dari pengusutan perkara. Ditreskrimsus Polda Gorontalo masih akan mendalami kasus tersebut dan membuka peluang pengembangan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.Penyidik selanjutnya akan melengkapi berkas perkara sebelum berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk pelimpahan berkas tahap pertama. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Polda Gorontalo serius membongkar praktik pengolahan dan pemurnian emas ilegal yang berpotensi merugikan negara sekaligus menimbulkan dampak terhadap lingkungan. **(roy/kif)**

Kapolda Ingatkan Warga Jangan Asal Sebar Hoaks

GORONTALO–GP - Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., memilih mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan Salat Subuh Keliling. Tak sekadar beribadah, momentum ini dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus mengingatkan bahaya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

Kegiatan berlangsung di Masjid Al-Muqorrobin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Sabtu (7/11/2026), dengan dihadiri sejumlah pejabat Polda Gorontalo, pemerintah kecamatan dan kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta jamaah setempat.

Dalam arahannya, Danang menegaskan bahwa Subuh Keliling bukan sekadar agenda keagamaan, melainkan menjadi ruang membangun komunikasi dan memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri, yakni "Polisi Bersama Masyarakat". Karena itu, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.



Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K salat subuh keliling di Masjid Al-Muqorrobin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Sabtu (7/11/2026)

Ia mengajak warga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, menghidupkan kembali budaya gotong royong, serta tidak mengabaikan potensi gangguan keamanan di sekitar tempat tinggal.

Jari Bisa Jadi Sumber Konflik

Salah satu pesan penting yang disampaikan Kapolda adalah bahaya penyalahgunaan media sosial. Mengangkat tema "Jarimu Harimaumu: Saring Sebelum Sharing, Bijak Bermedia Sosial, Cegah Hoaks dan Konflik", ia mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menerima dan menyebarkan informasi.

Hoaks, ujaran kebencian, hingga konten provokatif dinilai berpotensi memicu keresahan dan merusak persatuan apabila tidak disikapi secara bijak.

Kapolda mengajak masyarakat membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jangan sampai jari yang seharusnya digunakan untuk menyebarkan kebaikan justru menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat.

Ia juga berharap masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi berperan sebagai pusat pembinaan umat, penguatan moral, dan pembentukan karakter generasi muda agar tidak mudah terjerumus dalam pengaruh negatif.

Buka Ruang Kritik, Sosialisasikan Layanan 110

Tak hanya menyampaikan imbauan, Kapolda juga membuka ruang dialog dengan jamaah. Ia ingin mendengar langsung keluhan, aspirasi, kritik, maupun masukan masyarakat, terutama terkait pelayanan kepolisian dan kondisi keamanan di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas kepolisian.

Pada kesempatan itu, Kapolda turut menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian maupun meminta bantuan kepolisian.

Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau bertindak tidak sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan tersebut, Kapolda berharap hubungan Polri dan masyarakat semakin kuat. Komunikasi yang terbuka, kepedulian bersama, serta keterlibatan aktif warga menjadi modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Gorontalo. **(roy)**

Jemaat Diajak Jaga Toleransi dan Jauhi Narkoba



Plt Kapolres Gorontalo Utara, AKBP Dika Yosep Anggara,S.I.K. meminta kepada para jemaat gereja agar dapat menjaga toleransi antar umat beragama, serta menjauhi yang namanya narkotika.

GORUT-GP – Para jemaat gereja, diajak oleh Plt Kapolres Gorontalo Utara, AKBP Dika Yosep Anggara,S.I.K., agar dapat bersama-sama menjaga toleransi antar umat beragama serta menjauhi narkoba.

Hal ini disampaikan AKBP Dika saat melaksanakan kegiatan Minggu Kasih bersama jemaat Gereja Pantekosta Shekinah, yang ada di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Minggu (8/11). Dalam kesempatan itu, Plt Kapolres Gorontalo Utara turut didampingi oleh Waka Polres, Kompol Sofyan H. Abubakar,S.E.,M.H., Kasat Binmas Iptu Risno Mohamad,S.H., dan Kasi Propam, Iptu Stenly.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kapolres Gorontalo Utara, AKBP Dika Yosep Anggara,S.I.K. menyampaikan sejumlah pesan Kamtibmas kepada para jemaat, khususnya pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama, saling menghormati perbedaan keyakinan, serta memperkuat kerukunan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

"Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, kami berharap terjalin komunikasi dan hubungan silaturahmi yang semakin erat antara Polri dan masyarakat, sekaligus memperkuat toleransi antarumat beragama, demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara," harapnya.

Selain itu, Plt. Kapolres juga mensosialisasikan layanan Kepolisian 110 kepada para jemaat. Ia menyampaikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tidak hanya itu, AKBP Dika Yosep Anggara juga mengingatkan seluruh jemaat, agar menjauhi penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda, kehidupan keluarga, serta lingkungan masyarakat.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing, membangun kepedulian sosial, serta segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan," pungkasnya. **(kif)**

Seorang IRT di Kota Gorontalo Diamankan Polisi

GORONTALO-GP – Seorang ibu rumah tangga (IRT) di wilayah Kota Gorontalo, tepatnya di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, diamankan oleh aparat Kepolisian.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, IRT yang diamankan tersebut bernama SRI (34). Yang bersangkutan diamankan oleh personel Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Gorontalo, atas dugaan keterlibatan sebagai agen judi daring kupon putih (Togel). SRI diamankan atas laporan dan aduan masyarakat yang resah terhadap aktivitas perjudian di kawasan permukiman tersebut.

Dari hasil pemantauan dan penyelidikan tim di lapangan, SRI diduga berperan mengumpulkan pesanan nomor tebakan dari warga sekitar, kemudian memasukkannya ke akun situs judi daring pribadi miliknya untuk sejumlah putaran undian. Tim Kepolisian kemudian mendatangi kediaman SRI pada Kamis (5/11) sekitar pukul 11.00 WITA, dengan mengedepankan pendekatan persuasif, menunjukkan surat perintah resmi, serta disaksikan oleh pihak aparat kelurahan dan saksi setempat.



Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) diamankan oleh aparat Kepolisian atas dugaan keterlibatan dalam dugaan judi online.

Dari hasil penindakan di lokasi, petugas menyita sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Barang yang diamankan diantaranya, satu unit telepon seluler yang digunakan untuk operasional, empat lembar kertas catatan rekapan angka tebakan, buku tabungan, kartu ATM, serta sejumlah uang tunai yang diduga berkaitan dengan perputaran transaksi kupon putih tersebut.

Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Gorontalo, Kompol Akmal Novian Reza, S.I.K. menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memberantas segala bentuk perjudian, sekaligus mengingatkan dampak destruktif yang ditimbulkan di tengah masyarakat.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar menjauhi segala bentuk aktivitas perjudian, baik konvensional maupun online. Perjudian tidak pernah memberikan keuntungan nyata, justru menjadi pemicu kerugian ekonomi, merusak keharmonisan rumah tangga, hingga menimbulkan kerentanan tindak pidana lainnya. Kami tidak akan segan menindak tegas setiap praktik perjudian demi menjaga ketertiban umum," tegasnya.

Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Markas Polda Gorontalo, guna menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut oleh Subdit 3 Ditreskrimum. Pihak kepolisian tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus proaktif memberikan informasi demi mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. **(kif)**

Ruang Hidup di Kota-Kota Kita



Oleh :
Basri Amin

KITA butuh kota yang benar-benar dikelola dengan keberanian yang cerdas mengubah kenyataan dan yang dipimpin oleh gagasan yang jernih mengarahkan politik perbaikan ke masa depan.

Gesekan demi gesekan ruang hidup akan semakin mewarnai hampir semua kota-kota di dunia. Konflik tata ruang, kelola aset dan akses publik, tekanan penduduk dan permukiman, arus modal dan perubahan pola hidup, akan semakin mendesak gaya dan daya kepemimpinan baru di kota-kota kita. Untuk apa? Agar iklim "ruang bersama" yang lebih adil dan yang berkelanjutan bisa terasakan oleh semua kelompok masyarakat. Tidak mudah!

Dalam faktanya, kecukupan permukiman, timbunan perilaku yang merusak lingkungan dan kebersihan air, kesejukan dan keamanan bersama, kebisingan dan persampahan, semuanya datang-bertumpuk di saat yang sama. Kadang mendesak dengan pebuh-sesak di pagi sampai di sore hari, terkadang pula menumpuk-sesak di setiap malam dan di akhir pekan, dst. Ribuan orang "menumpuk" di kota --dan tentu saja beserta perilakunya dan motif-motifnya yang tak sepenuhnya terkontrol--.

Mengurus sebuah Kota adalah "membalut luka-luka sejarah dalam kebudayaan kita yang paling nyata... di mana agama-agama sekali pun seringkali berubah menjadi kekuatan penyembuh yang berulang terlambat... Di sisi lain, mereka yang merasa profesional, pakar, atau yang merasa berpengaruh memberi jalan keluar, sesungguhnya memendam rasa cemas yang berkepanjangan karena terpukau dengan pengakuan kekuasaan dan pemburuan rente ekonomi-politik baru yang selamanya rentan lepas dari tangannya...drama demi drama di atas panggung kekuasaan yang keropos tiang-tiang penyangganya...

Ibarat perahu, kota-kota kita "kelebihan penumpang" dengan gelombang yang menghadang. Terancam oleng penuh bahaya jika tak punya Nahkoda hebat yang disiplin dan yang tegas memahami navigasi, perubahan cuaca, dan kesiapan awaknya. Seorang *Kapiten Perahu* yang tertempa dengan firasat...

BANYAK kota kita yang kini kelihatan sibuk tetapi sesungguhnya dari waktu ke waktu tak punya arah dan jalan masa depan yang berjangka panjang. Banyak kota yang menampung banyak aparat, pejabat dan kapital, tetapi selalu terkesan tidak beroleh "kepemimpinan" yang otentik memihak kepada gagasan perbaikan dan kerja-kerja bermakna bagi semua golongan.

Kota sejatinya di bangun di atas sejarah, gagasan, aksi-aksi pembaruan yang berani, dan gerakan tertentu. Meski setiap kota tetaplah mempunyai semacam "luka" yang membutnya perih, entah itu sebuah luka di masa lalu dan/atau di masa kini, tetapi kota tetaplah merupakan pencapaian peradaban manusia yang tinggi.

Tak heran kalau orang cenderung menyenangi kota dan berlomba-lomba untuk tinggal di kota, menjadi warga yang *urbanized*.

Kota yang jujur selalu menyadarkan tentang keaslian (perangai) kita. Begitu banyak harapan kepada setiap kota yang kita bangun. Demikian juga dengan daftar keluhan dan persoalan. Untuk memenuhi setiap harapan, sepertinya cara "menyicil" merupakan pilihan, agar kota-kota kita tidak sesak nafas dengan harapan-harapannya sendiri.

Beban yang terus membesar membutuhkan penyikapan, pelibatan dan penyesuaian tindakan dan cara bernalar. Jika tidak, yang kita bangun hanyalah sebuah kota yang berisi keramaian dan kerumunan. Kota seperti ini pada akhirnya hanya akan mewariskan "luka" yang terus menganga

Masa depan sebuah kota terlalu penting untuk hanya diserahkan kepada birokrasi. Apalagi, jika perangai yang dibangun oleh pemerintah kota lebih banyak memproduksi "kata-kata" dan "piagam-piagam" lencana, tapi tidak sepenuhnya memperlihatkan kerelaan cerdas untuk "belajar" dengan tuntas, agar lebih memahami yang rinci dan mampu memungut masukan-masukan dan jalan-jalan (keluar) yang kreatif atas setiap persoalan.

Tidak semua kota sukses memelihara modalnya yang unik, yakni keterbukaan dan kejujurannya dalam menemukan kesalahan. Ada kesan yang kuat, pemerintah kota-kota di negeri ini lebih sibuk menebar "tontonan" dan kesan-kesan yang dangkal --termasuk beragam gaya seremoni— daripada sungguh-sungguh mengerahkan kemampuan tata-kelola terbaiknya dan dengan sikap itu pula ia rela berkeringat untuk perbaikan-perbaikan mendasar.

Kata-kata yang disertai angka-angka tentang kemajuan sebuah kota hanyalah lapisan luar dari apa-apa yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakatnya. Tak perlu kita berbasa-basi bahwa kota-kota kita masih menampung angka kemiskinan yang lumayan; demikian juga dengan rentannya rasa aman dan nyaman di berbagai sudut. Di luar itu, kriminalitas dan penggunaan *narkoba* sejak awal sudah menyasar berbagai segmen; belum lagi dengan premanisme dan beragam illegalitas lainnya. Dan pada saat yang sama roda pasar dan sektor perdagangan *memaksa* pemanfaatan ruang di perkotaan, tidak jarang membuahkan gesekan dan guncangan di sudut-sudut perparkiran, pertokoan, dan perumahan.

Setiap jengkal ruang kota hendaknya dipastikan status dan kontribusi (fungsionalnya) dalam pembangunan perkotaan kita. Dengan begitu, "tata ruang" tidak sekadar gincu dari motif kita yang sebenarnya, yakni "tata uang". Di kota, antara *ruang* dan *uang* sudah sangat tumpang-tindih. Di sinilah letaknya mengapa kuasa (pemerintah) mudah digeser oleh kuasa-kuasa "lain" di luar dirinya, terutama karena kepentingan penguasaan ruang merupakan kekuatan paling keras yang menekan (otoritas) negara di perkotaan.

Jika ini tidak disadari sejak awal dengan memadai, maka sebuah kota tak lagi punya ruh dan identitas. Ia tak lebih sebagai tumpukan pemukiman, pertokoan, dan tempat hiburan saja yang disesaki dengan gedung, dililit trotoar, gudang-gudang dan gugusan komoditi, orang dan kendaraan yang lalu-lalang.

Penulis adalah
Anggota Indonesia Social Justice Network (ISJN)
E-mail: basriamin@gmail.com

73 Tahun Merawat Semangat Demokrasi



Oleh :
Ramli Ondang Djau

DEMOKRASI tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh melalui proses panjang, pergulatan sejarah, keberanian politik, dan kesediaan sebuah bangsa untuk terus memperbaiki cara mengelola kekuasaan. Dalam perjalanan Indonesia, pemilihan umum menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

Pada 7 November 1953, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Pemilu 1955. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak sejarah kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Dari titik itulah perjalanan panjang penyelenggaraan pemilu mulai menemukan bentuknya.

Pemilu 1955 bukan sekadar peristiwa politik pertama setelah Indonesia merdeka. Ia merupakan pernyataan bahwa bangsa yang masih muda ini memiliki keberanian untuk menyerahkan penentuan arah kekuasaan kepada rakyat melalui mekanisme demokratis. Di tengah keterbatasan infrastruktur, dinamika politik, dan tantangan kebangsaan, jutaan warga datang menggunakan hak pilihnya.

Tujuh puluh tiga tahun perjalanan dari pembentukan PPI pada 1953 hingga 2026 mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya tentang pergantian kekuasaan. Lebih dari itu, demokrasi adalah komitmen untuk terus menjaga kebebasan, kesetaraan, dan kehormatan suara rakyat.

Dari Sejarah Menuju Kemandirian

Sejarah penyelenggaraan pemilu Indonesia tidak selalu berjalan dalam situasi yang ideal. Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan pemilu berada dalam struktur pemerintahan melalui Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi membutuhkan penyelenggara yang memiliki jarak dari kepentingan kekuasaan.

Reformasi 1998 kemudian menjadi titik balik. KPU dibentuk melalui UU Nomor 3 Tahun 1999 sebagai bagian dari perubahan sistem politik Indonesia. Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001 selanjutnya memperkuat landasan konstitusional penyelenggara pemilu melalui Pasal 22E ayat (5), yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemandirian tersebut bukan hadiah sejarah. Ia merupakan hasil perjuangan demokrasi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak tunduk pada kepentingan penguasa ataupun peserta pemilu. Namun, setelah lebih dari dua dekade Reformasi, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kemandirian kelembagaan sudah cukup untuk menjamin kualitas demokrasi? Jawabannya tentu belum.

Kemandirian merupakan fondasi, tetapi kepercayaan publik adalah capaian yang harus terus diperjuangkan. KPU tidak cukup hanya memiliki kewenangan konstitusional. Masyarakat juga harus merasakan bahwa setiap keputusan dan tindakan penyelenggara mencerminkan integritas, profesionalisme, transparansi, serta keadilan. Kepercayaan tidak dibangun melalui slogan kelembagaan. Ia tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan proses kepemiluan. Apakah hak pilih mereka terlindungi? Apakah informasi tersedia secara terbuka? Apakah setiap warga mendapatkan pelayanan yang setara? Apakah keputusan penyelenggara dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan? Di sinilah integritas menjadi ukuran penting. Integritas bukan hanya tentang tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga tentang keberanian menjaga prinsip ketika berhadapan dengan tekanan dan kepentingan politik.

Pengalaman Pemilu 2024, termasuk berbagai persoalan dalam implementasi teknologi informasi seperti Sirekap, memberikan pelajaran bahwa inovasi digital harus didukung akurasi, kesiapan sistem, keamanan data, dan komunikasi publik yang efektif. Teknologi seharusnya memperkuat transparansi, bukan justru menciptakan ruang kecurigaan. Kritik masyarakat pun tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap independensi. Kritik merupakan bagian dari kontrol demokratis yang membantu penyelenggara memperbaiki kualitas kelembagaannya.

Demokrasi Membutuhkan Partisipasi yang Bermakna

Satu hal yang perlu terus kita ingat adalah bahwa rakyat bukan sekadar angka dalam daftar pemilih atau statistik partisipasi setelah pemungutan suara. Demokrasi membutuhkan warga yang memahami hak politiknya, memiliki akses terhadap informasi, berani menyampaikan aspirasi, dan memperoleh ruang untuk terlibat dalam proses demokrasi.

Dalam perspektif akademis, gagasan ini sejalan dengan teori demokrasi deliberatif. Demokrasi tidak hanya diukur melalui mekanisme pemungutan suara, tetapi juga melalui kualitas dialog, pertukaran gagasan, kesetaraan kesempatan, dan keterlibatan warga dalam ruang publik. Partisipasi yang bermakna tidak berhenti ketika seseorang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Partisipasi juga hadir ketika masyarakat mengawasi tahapan pemilu, memberikan masukan, melawan disinformasi, dan menjaga integritas proses demokrasi.

Dalam konteks masyarakat daerah, modal sosial dan nilai budaya dapat menjadi kekuatan penting. Di Gorontalo, misalnya, nilai huyula yang mengandung semangat gotong royong dan kebersamaan dapat menjadi inspirasi untuk membangun kesadaran demokrasi. Namun, kebersamaan harus tetap menghormati kebebasan individu. Loyalitas keluarga, hubungan kekerabatan, maupun kedekatan sosial tidak boleh berubah menjadi tekanan yang membatasi kemerdekaan seseorang dalam menentukan pilihan politik. Demokrasi yang sehat membutuhkan kebersamaan tanpa menghilangkan kebebasan.

Menuju Pemilu 2029: Menguji Kematangan Demokrasi

Pemilu 2029 tidak boleh dipandang sekadar sebagai agenda rutin lima tahunan. Ia harus menjadi momentum untuk menguji kematangan demokrasi sekaligus kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu. Ada beberapa agenda yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, memperkuat independensi dan integritas penyelenggara di semua tingkatan. KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga badan ad hoc harus memiliki standar profesionalisme dan etika yang konsisten. Independensi harus tercermin dalam setiap keputusan, bukan hanya tertulis dalam regulasi.

Kedua, membangun tata kelola pemilu yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi harus didukung sistem yang teruji, keamanan data, keterbukaan informasi, dan kemampuan menjelaskan setiap persoalan secara cepat serta terukur.

Ketiga, memperkuat pendidikan pemilih yang substantif. Sosialisasi tidak cukup hanya mengajak masyarakat datang ke TPS. Pendidikan pemilih harus membangun kesadaran tentang kedaulatan rakyat, bahaya politik uang, disinformasi, serta pentingnya menentukan pilihan secara bebas dan bertanggung jawab.

Keempat, memperluas partisipasi publik. Masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan kritik, masukan, dan aspirasi. Penyelenggara harus membangun komunikasi dua arah agar masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga bagian dari proses demokrasi.

Kelima, memastikan keadilan elektoral. Setiap peserta pemilu harus memperoleh perlakuan setara. Setiap pemilih harus mendapatkan hak yang sama. Setiap suara harus dihitung secara jujur dan setiap pelanggaran harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum.

Keberhasilan pemilu tidak cukup diukur dari terselesaikannya seluruh tahapan tepat waktu. Kualitas pemilu juga ditentukan oleh kemampuan penyelenggara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasilnya.

Menjaga Pemilu, Menjaga Kehormatan Demokrasi

Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu di daerah, saya memandang tugas ini bukan semata-mata pekerjaan administratif atau kewajiban institusional. Ada tanggung jawab moral yang melekat di dalamnya. Bekerja dalam penyelenggaraan pemilu berarti mengambil bagian dalam menjaga hak konstitusional warga negara. Di balik setiap nama dalam daftar pemilih terdapat manusia dengan hak politiknya. Di balik setiap surat suara terdapat harapan. Dan di balik setiap hasil pemilu terdapat mandat rakyat yang harus dihormati.

Saya mencintai pekerjaan ini bukan karena jabatan atau kewenangan yang melekat di dalamnya, melainkan karena ada kesempatan untuk ikut menjaga salah satu fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu, menjadi penyelenggara pemilu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada kritik, tekanan, keterbatasan, bahkan kesalahpahaman dalam menjalankan tugas. Namun, justru dalam situasi seperti itulah integritas diuji. Kecintaan terhadap demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui slogan atau seragam kelembagaan. Ia harus hadir dalam keberanian bersikap netral, ketelitian bekerja, kesediaan melayani, dan keteguhan mempertahankan prinsip keadilan.

Saya percaya, penyelenggara pemilu yang baik bukanlah mereka yang selalu dipuji, melainkan mereka yang tetap bekerja benar meskipun tidak selalu mendapatkan "tepuk tangan". Pada akhirnya, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bukan hanya tanggung jawab KPU atau Bawaslu. Ia merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa: pemerintah, peserta pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media, akademisi, dan setiap warga negara. Mari merawat demokrasi dengan sikap dewasa. Berbeda pilihan bukan alasan untuk bermusuhan. Kompetisi politik bukan pembenaran untuk menghalalkan segala cara. Kekuasaan yang diperebutkan melalui pemilu harus tetap tunduk pada etika dan hukum.

Tujuh puluh tiga tahun perjalanan sejarah penyelenggaraan pemilu mengajarkan bahwa demokrasi selalu membutuhkan orang-orang yang bersedia menjaga dan memperjuangkannya. Kemandirian penyelenggara adalah capaian penting Reformasi. Namun, tantangan kita hari ini adalah memastikan kemandirian itu menghasilkan kepercayaan, partisipasi yang bermakna, dan keadilan elektoral. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilu, tetapi juga tentang bagaimana proses kemenangan itu diperoleh dan seberapa besar kehormatan suara rakyat dijaga. Mari terus merawat semangat demokrasi. Menjaga independensi, memperkuat integritas, menghormati perbedaan, dan bersama-sama mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Sebab, demokrasi bukan hanya warisan sejarah. Demokrasi adalah tanggung jawab yang harus kita rawat hari ini dan kita wariskan kepada generasi mendatang.

Dirgahayu Komisi Pemilihan Umum (KPU), semakin dewasa menjunjung tinggi Integritas dan Profesional dalam merawat Demokrasi.

Penulis adalah
Anggota KPU Kota Gorontalo

Optimalisasi Pemda Terhadap RKPD Perlu Ditingkatkan

TILONGKABILA-GP- Optimalisasi pemerintah daerah terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi salah satu catatan penting yang disampaikan DPRD dalam rapat paripurna tingkat II terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 belum lama ini.

Catatan tersebut disampaikan Aleg Amin Nusi yang mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia menjelaskan, pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan RKPD. Sebab, aspirasi tersebut merupakan representasi kebutuhan masyarakat yang diserap melalui pelaksanaan fungsi dan tugas anggota legislatif.

Menurut Amin, secara regulasi pokok-pokok pikiran DPRD harus disampaikan dan ditelaah sebelum RKPD disempurnakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menempatkan hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD sebagai salah satu masukan penting dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya, masukan tersebut perlu diselaraskan dengan prioritas dan arah pembangunan daerah.

Olehnya, DPRD mendorong agar setiap RKPD yang disusun pemerintah daerah benar-benar mampu mengakomodasi dan menjabarkan aspirasi masyarakat dengan tetap berpedoman pada RPJMD selama lima tahun pemerintahan IRIS. Selain itu, harmonisasi antara pihak eksekutif dan legislatif juga perlu diperkuat agar perencanaan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, harmonisasi tersebut masih belum maksimal dilaksanakan. Padahal, keterlibatan dan penyelarasan antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan pokok-pokok pikiran DPRD tidak sekadar tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar mendapat perhatian dalam program dan prioritas pembangunan daerah. " olehnya DPRD mendorong setiap RKPD bisa dijabarkan oleh Pemda dengan menitikberatkan RPJMD 5 tahun pemerintahan IRIS dan melakukan Harmonisasi dengan Legislatif ini yang masih kurang maksimal dilaksanakan," ujarnya belum lama ini.**(csr)**



Potensi Wisata Desa Harus Dijadikan Penggerak Ekonomi

DPRD Dukung dengan Hasilkan Perda Pengelolaan Desa Wisata

TILONGKABILA-GP- Pengembangan desa wisata harus diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal yang dimiliki setiap desa. Tidak sekadar mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, keberadaan destinasi wisata juga harus mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat setempat.

Hal inilah yang kemudian didukung ketua Bapemperda DPRD Bonbol Romi Mohamad,dengan menghasilkan Perda Pengelolaan Desa Wisata. Dimana Perda yang diharapkan menjadi payung hukum penyelenggaraan pemerintah daerah itu,diharapkan supaya pengelolaan desa wisata kedepan perlu mengedepankan konsep pariwisata berbasis masyarakat. Artinya,kata Romi masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari aktivitas pariwisata, tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata di desanya.

Sebab menurutnya, setiap desa masing masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal sehingga mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Olehnya, pengembangan desa wisata perlu dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Keterlibatan warga dapat diwujudkan melalui berbagai usaha pendukung pariwisata, seperti penyediaan kuliner khas, produk kerajinan, jasa wisata hingga pemasaran produk unggulan desa. Dengan demikian, aktivitas pariwisata tidak hanya menguntungkan pengelola destinasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Dia juga berharap, pengembangan desa wisata ke depan tidak hanya berorientasi pada popularitas destinasi dan peningkatan kunjungan wisatawan.

Lebih penting dari itu, potensi wisata yang dimiliki desa harus mampu menjadi penggerak ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan desa." Pengelolaan desa wisata, diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal desa melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat. Belum banyak desa wisata tidak boleh hanya mengandalkan potensi pada peningkatan kunjungan wisatawan saja tetapi juga harus ikut membangun memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat desa," jelasnya belum lama ini.**(csr)**

JANGAN BERHENTI DIPARIPURNA

Perda Harus Disosialisasikan Ditingkat Bawah

TILONGKABILA-GP- Disetujuinya enam buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna tingkat II belum lama ini mendapat beragam tanggapan positif dari kalangan anggota legislatif (Aleg). Sejumlah Aleg turut memberikan apresiasi sekaligus menyampaikan saran dan masukan agar produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu apresiasi dan masukan tersebut disampaikan Aleg DPRD Bone Bolango Yakob Tangahu. Politisi Partai Demokrat yang bergabung dalam satu fraksi dengan NasDem itu mengapresiasi lahirnya enam Ranperda tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi bukti adanya kerja sama dan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah. Namun, Yakob mengingatkan agar proses pembentukan Perda tidak hanya berakhir pada pengesahan dalam rapat paripurna tingkat II.

Ia menilai, setelah ditetapkan menjadi produk hukum daerah, Perda perlu ditindaklanjuti melalui sosialisasi secara berkesinambungan hingga ke tingkat bawah. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui, memahami, serta dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai ketentuan yang telah diatur di dalamnya.

"Jangan sampai prosesnya hanya berhenti sampai di sini, sementara masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Perda tersebut. Karena itu, produk hukum yang sudah dihasilkan harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memahami maksud dan tujuan serta manfaat dari setiap regulasi," tandasnya belum lama ini.**(csr)**

Hasto Menganggap Gibran Tak Punya Legitimasi Lagi Jadi Pemimpin

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tak memiliki legitimasi lagi sebagai pemimpin nasional.

Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu pemakzulan Gibran setelah putusan MK dan MA di Blitar, Jawa Timur (Jatim), Jumat (7/11).

Hasto, bahkan menyebut Gibran tak punya legitimasi kuat sebagai pemimpin jauh sebelum muncul pertimbangan MK dan putusan MA terkait ijazah putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Dia membeberkan tiga catatan penting yang membuat legitimasi Gibran dipertanyakan, satu di antaranya putusan MK Nomor 90 yang kental akrobat hukum.

"Kedua, Pilpres 2024 dan Pileg 2024 hingga Pilkada 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto di Blitar, Jumat ini. Dia mengatakan munculnya pasal selundupan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 juga membuat legitimasi Gibran hancur.

"Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin," ujarnya. Menurut Hasto, putusan MK terkait ijazah Gibran memperkuat anggapan eks Wali Kota Solo itu tak punya legitimasi sebagai pemimpin. Dia menyimpulkan gugurnya aspek-aspek mendasar tersebut secara otomatis menghilangkan legitimasi kepemimpinan yang bersangkutan.

"Tidak hanya proses dari saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi," tegas Hasto. Menindaklanjuti hal tersebut dalam jalur legislatif, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP terus berdialog dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI.

Dia melanjutkan isu penyadapan yang marak belakangan ini turut memperkuat desakan publik. "Saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi maakin kuat, sehingga suara-suara yang makin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata dia.

Saat ditanya mengenai kesamaan pandangan dari delapan fraksi di parlemen, Hasto mengonfirmasi bahwa komunikasi politik antarpartai terus berjalan secara intensif.

"Ya, proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditoleransi, ya," pungkas Hasto. **(jpnn)**

Festival Literasi Bukan Seremoni

Kota Gorontalo Siapkan IKM Cluster

Haryono Dorong Pembinaan Usaha Lintas OPD

GORONTALO – GP – Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Gorontalo disiapkan memasuki pola baru. Pemerintah tidaklagi hanya mengandalkan program masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi mulai membangun sistem pembinaan terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.Konsep tersebut digagas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdagin) Kota Gorontalo, Haryono Suronoto, melalui program perubahan bertajuk Kota Gorontalo IKM Cluster.



Haryono Suronoto

Program ini dirancang untuk mengatasi persoalan pembinaan yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri. Setiap instansi memiliki agenda, sasaran, dan target masing-masing sehingga dukungan terhadap pelaku IKM belum sepenuhnya terintegrasi.Haryono menilai, pola tersebut perlu dibenahi agar berbagai program pemerintah benar-benar memberikan dampak yang lebih besar bagi perkembangan industri kecil dan menengah.

Ia mencontohkan, Dinas Tenaga Kerja bisa menggelar pelatihan bagi kelompok peserta tertentu, sementara Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan kegiatan serupa dengan kelompok sasaran berbeda.

"Selama ini sifatnya masih sektoral, belum berkolaborasi," ungkap Haryono saat diwawancarai awak media.Untuk mengubah pola tersebut, ia memperkenalkan Model 5S sebagai fondasi pelaksanaan pembinaan IKM secara kolaboratif.

Model ini mencakup lima prinsip utama, yakni Shared Data (data bersama), Shared Target (target bersama), Shared Plan (perencanaan bersama), Shared Action (aksi bersama), dan Shared Outcome (hasil bersama).Menurut Haryono, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyatukan data pelaku IKM lintas OPD. Kesamaan basis data akan membuat setiap instansi memiliki gambaran yang sama mengenai kondisi, potensi, serta kebutuhan pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan.Dari data tersebut, pemerintah kemudian dapat menetapkan target dan menyusun perencanaan secara bersama-sama."Jadi mulai dari data, kita lintas sektor atau OPD punya data yang sama. Begitu juga target, kita akan lebih berfokus pada target bersama," jelasnya.Dengan pendekatan ini, setiap OPD tidak lagi sekadar mengejar capaian program masing-masing. Sebaliknya, seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung tujuan yang sama, yakni memperkuat dan mengembangkan IKM di Kota Gorontalo.

"Tidak lagi Dinas Kesehatan punya target sendiri, Disnaker punya target sendiri, dan Dinas Perdagangan punya target sendiri," tambahnya. Kolaborasi tersebut juga akan diterapkan dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. Masing-masing instansi tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya, tetapi seluruh intervensi harus saling mendukung. Haryono berharap, Kota Gorontalo IKM Cluster dapat menjadi model tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sektor industri. "Intinya, kita berangkat dari data yang sama kemudian target yang sama. Itu berarti satu IKM bisa mendapatkan berbagai intervensi dari berbagai pihak melalui kolaborasi," pungkasnya.**(adv)**

Posisi Kas Daerah Per 05 November 2026

I	Posisi Saldo Kas BUD per 04 November 2026		94.190.277.123,23
	Penerimaan Kas Daerah per 05 November 2026	507.460.185,46	
	Pengeluaran Kas Daerah per 05 November 2026	2.234.699.334,00	
II	Saldo Akhir per 05 November 2026		92.463.037.974,69

Gorontalo, 06 November 2026
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO
Ttd
MARWAN MURSIDI, S.Sos, MH



(FOTO: PROKOPIM)

Pj Sekda Kota Gorontalo, Nuryanto menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba literasi yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo, Kamis (5/11/2026).

Perkuat Silaturahmi Warga Gorontalo di Perantauan

Pj Sekda Apresiasi Pelaksanaan Kongres V KKIG

GORONTALLO – GP – Sebanyak 559 peserta dari berbagai daerah menghadiri Kongres V Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo, Bhandayo Lo Yiladia (BLY), Jumat (6/11/2026). Kongres yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 6–8 November 2026, ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan masyarakat Gorontalo yang telah berkiprah di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibie, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, serta Wali Kota Gorontalo yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah, Nuryanto.

Hadir pula Dewan Pembina DPP KKIG Marsda (Purn) Mujahidin Harpin Onde dan Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, Iskandar Kamaru.

Dalam rangkaian acara, pelantikan pengurus DPD KKIG tiap-tiap daerah dilakukan oleh Ketua Umum DPP KKIG Syafrudin Mosii, yang pada kongres kali ini juga akan mengakhiri masa jabatannya.

Pj Sekda Gorontalo, Nuryanto mengapresiasi kongres tersebut. Karena, dia bilang, kongres yang dilaksanakan memiliki arti penting, bukan hanya bagi keberlanjutan organisasi, tetapi juga dapat memperkuat silaturahmi warga Gorontalo yang ada di perantauan.

"Selain agenda utama, tentu kegiatan ini menjadi agenda pulang kampung dan sarana silaturahmi antar-warga Gorontalo yang telah berkiprah dan merantau di berbagai daerah di Tanah Air," ujar Pj. Sekda Nuryanto.

Ia juga mengapresiasi antusiasme para peserta yang rela datang dari berbagai daerah untuk menghadiri kongres, bahkan dengan biaya sendiri.

"Semangat para peserta yang datang dari berbagai daerah, pulang kampung dan ikut kegiatan ini, terlebih hadir dengan biaya sendiri, itu sangat luar biasa dan patut diapresiasi," katanya. Pj. Sekda Nuryanto berharap seluruh rangkaian Kongres V KKIG dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi keberlanjutan organisasi.

"Melalui kongres ini, KKIG diharapkan semakin memperkuat solidaritas antar-sesama warga Gorontalo, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan di tanah rantau," pungkas Pj. Sekda Nuryanto.**(adv)**

Nuryanto: Investasi Masa Depan

GORONTALO – GP – Pemerintah Kota Gorontalo terus mendorong penguatan budaya literasi di tengah masyarakat. Berbagai program yang digelar sepanjang 2026 diharapkan tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga membentuk masyarakat yang berwawasan luas, kreatif, dan mampu bersaing.

Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, saat menutup Festival Literasi Tahun 2026 di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gorontalo, Kamis (5/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Nuryanto mengapresiasi pelaksanaan berbagai kegiatan literasi yang telah digagas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sepanjang tahun ini, tercatat sembilan program dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan perpustakaan sekaligus membangun kebiasaan membaca di tengah masyarakat.

Sejumlah kegiatan tersebut meliputi lomba bertutur, bimbingan teknis penulisan berbasis budaya lokal, lomba perpustakaan kelurahan, literasi informasi, hingga lomba pembuatan video konten literasi.

Menurut Nuryanto, rangkaian kegiatan tersebut tidak boleh sekadar dipandang sebagai pemenuhan target program pemerintah. Lebih dari itu, seluruhnya merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Seluruh kegiatan ini bukan semata-mata untuk memenuhi target program, tetapi bertujuan membangun masyarakat yang memiliki kemampuan literasi, wawasan, kreativitas serta daya saing," ujarnya.

Ia menegaskan, pengembangan budaya literasi membutuhkan keterlibatan semua elemen, bukan hanya pemerintah dan pengelola perpustakaan. Keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat harus mengambil peran agar literasi tumbuh menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

"Jadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat dan jadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari," pesannya.**(adv)**

Lomba Vokalia Meriahkan HKN ke-62

Adhan Dambea Ikut Menyaksikan

GORONTALO – GP – Suasana peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Kota Gorontalo berlangsung semarak. Berbeda dari kegiatan seremonial pada umumnya, perayaan tahun ini turut menghadirkan lomba vokalia yang mempertemukan para tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Memasuki malam kedua pelaksanaan, Sabtu (7/11/2026), kemeriahan lomba yang dipusatkan di Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo itu masih terasa. Sejumlah peserta tampil menunjukkan kemampuan olah vokal di hadapan para penonton.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, juga hadir langsung menyaksikan penampilan para peserta. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan yang melibatkan dokter, perawat, serta jajaran tenaga kesehatan tersebut.

Menariknya, lomba vokalia ini bukan kegiatan yang muncul secara tiba-tiba. Gagasan tersebut sebelumnya telah disampaikan Adhan saat menutup rangkaian Bulan Wawasan Kebangsaan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (31/8/2026).

Kala itu, Adhan secara khusus meminta para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, baik yang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas, untuk mulai mempersiapkan diri menyambut peringatan HKN ke-62 melalui berbagai perlombaan.

"HKN yang akan datang kita akan memperingati Hari Kesehatan. Maka siap-siap dokter kita berlomba," ujar Adhan saat itu.

Ia bahkan mendorong para tenaga kesehatan agar tidak menunggu mendekati hari pelaksanaan untuk mulai berlatih. Persiapan sejak dini dinilai penting agar seluruh peserta dapat tampil maksimal. Bagi Adhan, kegiatan semacam ini bukan sekadar ajang kompetisi untuk memperebutkan kemenangan.



(FOTO: KOMINFO)

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea bersama sejumlah pejabat tengah menyaksikan lomba vokalia antar Nakes yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HKN ke-62.

Lebih dari itu, perlombaan menjadi kesempatan bagi para aparatur dan tenaga kesehatan untuk membangun keakraban, mempererat kebersamaan, serta menikmati suasana berbeda di luar rutinitas pekerjaan.

Melalui lomba vokalia, peringatan HKN ke-62 di Kota Gorontalo tidak hanya menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pembangunan sektor kesehatan, tetapi juga memberikan ruang bagi para tenaga kesehatan untuk menyalurkan bakat dan kreativitas.

Di tengah padatnya tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan tersebut sekaligus menghadirkan suasana kebersamaan yang diharapkan dapat memperkuat semangat dan kekompakan insan kesehatan.**(adv)**

https://digital.gorontalopost.id
https://gorontalopost.id